

**PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA MALANG**
(Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kotalama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu
Pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

GALUH INTAN PERMATASARI

NIM. 0410310048



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
2008**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Malang (Study Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Disusun oleh : GALUH INTAN PERMATASARI

NIM : 0410310048

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah



Malang, Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 131 131 029

Drs. Bambang Santoso, MS
NIP. 131 573 953



LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Oktober 2008
Jam : 08.00-09.00
Skripsi atas nama : Galuh Intan Permatasari
Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Malang (Study Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 131 131 029

Anggota

Drs. Bambang Santoso, MS
NIP. 131 573 953

Anggota

Dr. Abdul Hakim, MSi
NIP. 132 475 903

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, MSi
NIP. 130 704 335

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur–unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S–1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Agustus 2008

Yang Membuat Pernyataan

Galuh Intan Permatasari
NIM. 0410310048

ABSTRAKSI

Galuh Intan Permatasari, 2008. **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) (Study pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurusan administrasi Publik. Universitas brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1) Bapak Sumartono (2) Bapak Bambang Santoso H**

Perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah memberikan peluang besar bagi daerah dalam pembangunan daerahnya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* (penyedia) dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Salah satu masalah dalam pembangunan yang harus segera ditangani adalah masalah kemiskinan khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan dimana masalah ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri. Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisa peran pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang seta mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan interview, melakukan observasi dan mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini antara lain: 1) Peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang meliputi : a) Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam proses penyaluran dana bantuan P2KP. b) Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dan bekerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan program P2KP. 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa : 1) Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama sebagai fasilitator adalah untuk memberikan pendampingan atau upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan P2KP agar mencapai keberhasilan salah satunya memfasilitasi proses penyaluran dana bantuan P2KP. Tim koordinasi Kota (Korkot), KMW, PJOK, Fasilitator Kelurahan, BKM, serta KSM memiliki peran penting sebagai pelaksana Proyek P2KP untuk mencapai keberhasilan proyek P2KP. 2) selain sebagai fasilitator pemerintah daerah juga sebagai koordinator dalam pelaksanaan P2KP ini yaitu dengan jalan melakukan koordinasi baik dengan pemerintah kelurahan maupun pihak-pihak terkait akan tetapi dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Kotalama salah satu pihak tidak dilibatkan yaitu pihak Kelurahan. 3) Faktor pendukung

dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah Sumber Daya Manusia di dalam BKM Sejahtera yang Profesional dalam melaksanakan P2KP 4) Faktor Penghambat dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah Permodalan serta Keaktifan dari para pengurus BKM sendiri Pelaksanaan Proyek P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Perlu adanya koordinasi antara aktor yang berperan baik dari Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri hingga Pemerintah Kelurahan serta BKM dan anggota KSM/KMA yang tergabung dalam proyek ini. Agar dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal itu, saran yang diberikan yaitu Pelaksanaan Proyek P2KP di Kelurahan Kotalama perlu adanya koordinasi antara aktor yang berperan baik dari Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri hingga Pemerintah Kelurahan serta BKM dan anggota KSM/KMA yang tergabung dalam proyek ini. Agar dalam pelaksanaan Proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Sebaiknya pihak kelurahan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek P2KP di Kelurahan Kotalama sesuai peran, fungsi dan tugas pokoknya.



ABSTRACT

Galuh Intan Permatasari, 2008. **THE LOCAL GOVERNMENT'S FUNCTION IN THE URBAN POVERTY ERADICATION PROJECT (P2KP) IMPLEMENTATION (Study at Community Self-Supporting Agency (BKM) in the Kotalama Village, Kedungkandang Subdistrict, Malang City).** Thesis. Concentrating on Local Government Administration. Mayoring in Public Administration. Malang Brawijaya University. **Supervisor: Sumartono. Co-supervisor: Bambang Santoso.**

New paradigm change in the local development organization brings greater opportunity to the local development, by putting the community as the main actor of development. It means that the government does not stand anymore as the provider and implementer, but only concerns with the role as facilitator and catalyst a problem of development relates to the poverty issue occurring in the city in which the issue becomes a collective responsibility, either form the central, provincial and local governments, the observer group and the community. Therefore, the government releases the Urban Poverty Eradication Program (P2KP).

The objective of research seems to describe and to analyze the function of local government of Malang City in the implementation of Urban Poverty Eradication Program (P2KP) in the Kotalama Village, Kedung Kandang Subdistrict, Malang City. Research also describes and analyzes the supporting and constraining factors in the implementation of Urban Poverty Eradication Program (P2KP) in the Kotalama Village, Kedung Kandang Subdistrict, Malang City.

Research employs qualitative approach using descriptive method. Data collection technique uses interview, observation, and documentation. Focus of research will be: (1) the function of local government of Malang City in the implementation of Urban Poverty Eradication Program (P2KP), referring to: (a) the local government as the facilitator of distributing P2KP financial aid and (b) the local government has good coordination and cooperation with central government and with related parties involved within the implementation of P2KP; and (2) the supporting and constraining factors in the implementation of Poverty Eradication Project.

Results of research indicate that: (1) the function of local government in the implementation of P2KP in the Kotalama Village as facilitator considers the counseling or the facilitation of P2KP implementation to get a success. A success story relates to the facilitation of distributing financial aid for P2KP. City Coordination Team, KMW, PJOK, Village Facilitator, BKM, and KSM also play important role as the implementer of P2KP to get the successful P2KP; (2) in addition to the function of facilitator, local government also acts as the coordinator in the implementation of P2KP, by having favorable coordination with village government and related parties, but the implementation of P2KP in the Kotalama Village disregards the participation of village officers ;(3) the supporting factor in the P2KP implementation of Kotalama Village, Kedungkandang Subdistrict, and Malang City counts for the professional human resource in the BKM Sejahtera with capability to implement P2KP; and (4) the constraining factor against the implementation of P2KP in the Kotalama Village,

Kedungkandang Subdistrict, Malang City, constitutes the capital and activation rate of BKM committee in the implementation of P2KP at Kotalama Village, Kedungkandang Subdistrict, Malang City. It needs a favorable coordination between actors, including the local government of Malang, the government of Village, BKM and members of KSM/KMA. It becomes important to make the Urban Poverty Eradication Project into a success.

Research suggests that the implementation of P2KP in the Kotalama Village needs coordination between actors with greater role either from the local government of Malang City, throughout the government of Village, BKM and members of KSM/KMA. It only concerns with the success of project implementation. The village officer should be involved within the P2KP implementation at Kotalama Village adjusted to the function and main duty.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Judul dari skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Study pada Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”

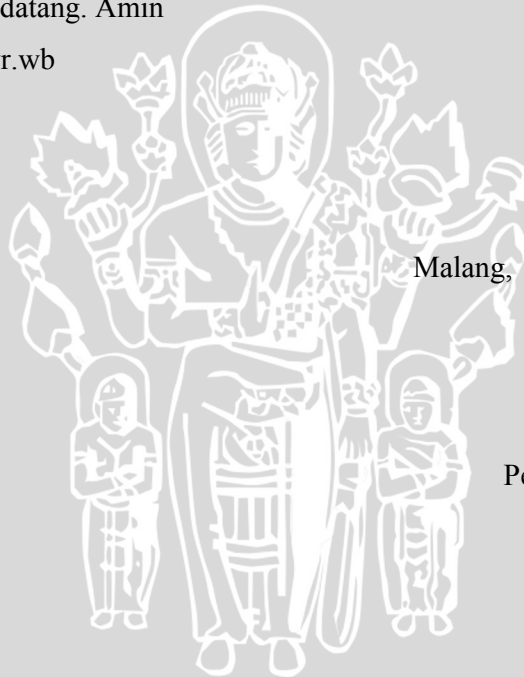
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. PhD, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang beserta seluruh staff
3. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku dosen pembimbing atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Drs. Bambang Santoso, MS, selaku dosen pembimbing atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi atas segala ilmu yang diberikan
6. Pengurus BKM Sejahtera, Kelurahan Kotalama, dan Masyarakat Kelurahan Kotalama atas kerjasama dan bantuannya.
7. Kepada Kedua orang tuaku tercinta, serta kedua adik-adikku, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Teman-teman Administrasi publik angkatan 2004, terima kasih atas segala kenangan dan pengalamannya,

9. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin

Wassalamualaikum wr.wb



Malang, Agustus 2008

Penulis



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah	
1. Pengertian Peranan	9
2. Pengertian Pemerintah	10
3. Peran Pemerintah Daerah	11
4. Peran Pemerintah Daerah Dalam	15
B. Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	
1. Definisi Pemberdayaan	15
2. Cara Memberdayakan Masyarakat.....	17
3. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	19
4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat	20
B. Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya	
1. Definisi Kemiskinan	22
2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	22
3. Ciri-Ciri Kemiskinan.....	23
4. Kemiskinan di Perkotaan	25
5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan.....	26
C. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	
1. Visi P2KP	27
2. Misi P2KP	28
3. Nilai-Nilai dan Prinsip yang melandasi P2KP.....	28
4. Tujuan P2KP.....	33
5. Strategi P2KP.....	34
6. Azas P2KP.....	34
7. komponen P2KP	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	38

C. Lokasi Dan Situs Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan data	41
F. Instrument Penelitian	43
G. Analisa Data	44
H. Keabsahan data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Kondisi Geografis	47
b. Kondisi Penduduk	47
c. Keadaan Mobilitas Penduduk	49
d. Keadaan Tingkat Pendidikan	50
e. Keadaan Ekonomi	50
f. Kelembagaan di Kelurahan Kotalama	51
g. Kondisi Kemiskinan di Kelurahan Kotalama	52
2. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kotalama	56
3. Gambaran Umum Proyek penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di BKM Kotalama	66
4. Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	
a. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam proses Penyaluran dana bantuan P2KP	71
b. Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dan bekerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun pihak-pihak terkait demi kelancaran P2KP	82
5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan P2KP	
a. Faktor Pendukung	91
b. Faktor Penghambat	93

B. Pembahasan

1 Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	
a. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam proses Penyaluran dana bantuan P2KP	100
b. Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP	109
2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan P2KP	
a. Faktor Pendukung	111
b. Faktor Penghambat	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

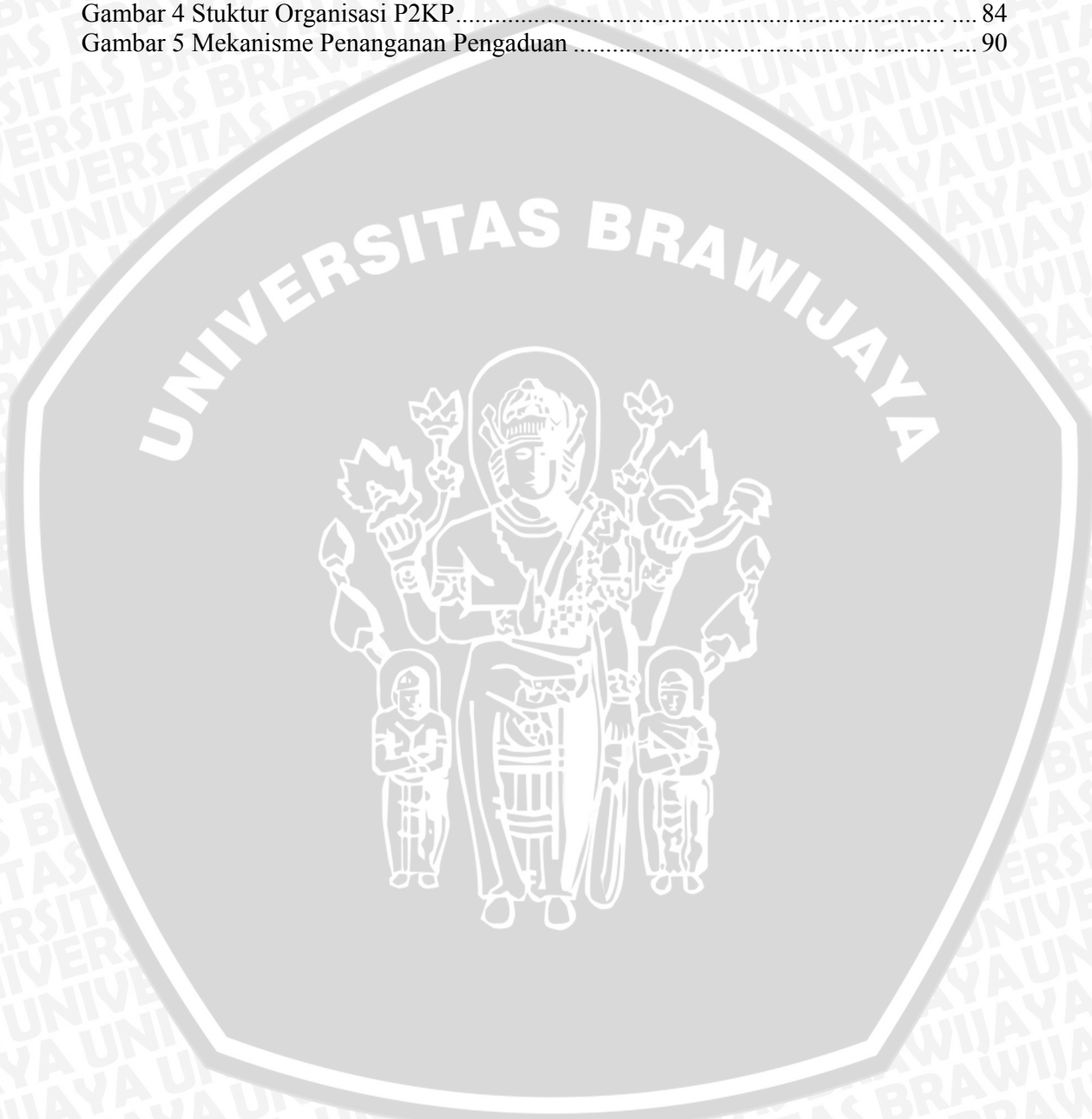
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	48
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotalama Menurut jenis Kelamin.....	48
Tabel 3 Penduduk Kelurahan Kotalama Menurut Usia	49
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotalama Menurut Agama.....	49
Tabel 5 Keadaan Mobilitas Penduduk	49
Tabel 6 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kotalama	50
Tabel 7 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	52
Tabel 8 Lembaga Pendidikan.....	52
Tabel 9 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan Di Kota Malang.....	53
Tabel 10 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Per Kelurahan Di Kota Malang.....	54
Tabel 11 Pihak-pihak yang berperan dalam Pelaksaan P2KP	85
Tabel 12 Daftar Tunggakan KSM di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Analisis Data Model Interaktif	45
Gambar 2 Struktur Organisasi BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama	58
Gambar 3 Stuktur Organisasi pengurus BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama	59
Gambar 4 Stuktur Organisasi P2KP	84
Gambar 5 Mekanisme Penanganan Pengaduan	90



BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah daerah dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Perubahan yang sangat signifikan ini terjadi pada saat diberlakukannya UU No. 22/tahun 1999 dan telah diganti menjadi UU No 32/tahun 2004, tentang pemerintahan daerah (Otonomi Daerah) serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menimbulkan berbagai perbedaan persepsi tentang kebijakan pembangunan dan pola penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah memberikan peluang besar bagi daerah dalam pembangunan daerahnya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* (penyedia) dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Selain itu, Prasajo (2004, h.20) juga menegaskan bahwa peran pemerintah adalah sebagai mediator, koordinator, pendidik dan mobilisator serta peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung sehingga masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan, sedangkan pelaku-pelaku pembangunan dituntut untuk memiliki komitmen (kesepakatan) yang kuat untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Salah satu masalah dalam pembangunan yang harus segera ditangani adalah kemiskinan dimana masalah ini merupakan tanggung jawab bersama, baik

pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri. Kemiskinan yang terjadi khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang menimbulkan terjadinya kepincangan sosial di perkotaan. Oleh karena itu, muncul berbagai pendekatan baru dalam upaya mengatasi kemiskinan, terutama Negara-negara berkembang, yang diusulkan oleh lembaga-lembaga donor dunia seperti Bank Dunia, Dalam hal ini Bank Dunia telah mengusulkan tiga pendekatan terpadu yang terdiri dari :

1. Peningkatan pertumbuhan serta strategi untuk memberikan kesempatan usaha bagi kelompok lemah, khususnya bagi kelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang tersedia.
2. Penyampaian layanan sosial dasar pada kelompok miskin
3. Penyampaian *safty nets* bagi mereka yang rentan terhadap kejutan melalui pemberian subsidi kepada mereka yang membutuhkan.

Selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, padahal kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mencakup multidimensi, seperti : (<http://www.P2kp.org/pustaka.asp?catid=1&>):

1. Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
2. Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;

3. Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
4. Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak dan
5. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Kemiskinan multidimensi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi isu sentral, menurut Bappenas pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami Indonesia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi merosot. Hal ini berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi yang terjadi di perkotaan. Urbanisasi yang berlebihan sehingga kota tidak mampu lagi menampung beban penduduk yang terus mengalir serta keterbatasan kemampuan kota untuk menyediakan peluang kerja bagi penghuninya yang terus bertambah, akibatnya, kaum urban yang tidak tertampung dalam bidang formal akan menggeluti sektor informal yang identik dengan kemiskinan, kekumuhan, ketidaktertiban dan ketidakberdayaan yang akhirnya terjadilah kepincangan sosial di perkotaan seperti pengangguran, kemiskinan, kenakalan dan kejahatan, serta masih banyak lagi.

Perhatian pada masalah kemiskinan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan dan program dalam upaya menggalakkan penanggulangan kemiskinan, seperti P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan masih banyak lagi.

Salah satu proyek yang sedang dikembangkan dan terus disempurnakan oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat adalah P2KP. P2KP singkatan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban). Pemerintah Indonesia selanjutnya menugaskan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman - Departemen Kimpraswil (sekarang Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum), sebagai pelaksana proyek (*executing agency*) dari P2KP.

Program ini merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005]. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup bantuan modal, penyediaan prasarana/sarana serta pendampingan masyarakat secara profesional melalui konsep-konsep P2KP yang diarahkan mampu mengangkat derajat kaum miskin dalam pengertian kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut

Dengan digulirkannya program inovatif P2KP melalui pengokohan kelembagaan masyarakat yang senantiasa mengakomodir aspirasi masyarakat (miskin) setidaknya dapat mencari solusi untuk menjawab persoalan-persoalan kemiskinan. Intervensi pendekatan program ini ditekankan pada penciptaan lapangan kerja, penyediaan stimulan dalam rangka pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan melalui pendampingan profesional, terwujudnya kemandirian masyarakat (miskin) melalui kelembagaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk mereka sendiri guna memperbaiki dan menanggulangi kemiskinan. Meskipun aspek kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan, tidak berarti peran pemerintah harus

tereliminir. Peran pemerintah dibutuhkan untuk membangun tumbuhnya partisipasi dan kemandirian masyarakat menanggulangi kemiskinan. Baik kemiskinan internal (individu atau masyarakat miskin) atau eksternal (terbatasnya infrastruktur) kebijakan yang belum akomodatif justru menjadi bagian/instrumen dasar pemerintah untuk menyusun grant strategy penanggulangan kemiskinan sebagai paradigma pembangunan berbasis kebutuhan dasar (*riil needs*) masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), khususnya tentang program yang dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu melalui proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah maka hubungan yang serasi antara penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah dikembangkan atas dasar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sistem penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan paradigma baru, maka peran pemerintah daerah adalah sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat maka masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan.

Dalam hal ini Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam P2KP tidak sebatas pada obyek saja, melainkan sebagai subyek yang menentukan keberadaan dan keberhasilan P2KP bagi masyarakat miskin perkotaan. Selain sebagai penerima bantuan dan sebagai pelaksana program, masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga yang merencanakan sekaligus memantau dan mengendalikan jalannya proyek. Fungsi ini diwujudkan dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yaitu suatu lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. BKM juga mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama

Kelembagaan masyarakat yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk membiayai

kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana wakaf bagi masyarakat, misalnya perbaikan yang layak. (Latar Belakang P2KP, edisi Revisi : 2004)

Program P2KP ini mulai dilaksanakan pada tahun 1999 dalam pelaksanaannya, proyek P2KP ini terjadi penyimpangan dana bantuan, hal ini terjadi di Kota Cimahi, ratusan juta rupiah dana bergulir P2KP I tahap I, yang dikelola BKM sejak 1999-2001, diduga macet. Dari 12 BKM yang menerima dana P2KP, 7 BKM di antaranya belum mampu mengembalikan pinjaman dari total dana yang digulirkan. Akibatnya, sejumlah BKM itu terancam mati. (<http://indo-friendster.com>). Begitu juga yang terjadi di Kota Malang khususnya di Kelurahan Kotalama, kemiskinan yang terjadi di Kotalama dari data Jumlah Kepala Keluarga 9.008 tercatat Jumlah RTM di Kelurahan Kotalama sebanyak 1204 KK sehingga menyumbang 18,64% kemiskinan di Kota Malang, oleh karena itu Kotalama merupakan salah satu kelurahan penerima dana bantuan P2KP. Dalam pelaksanaannya juga terdapat permasalahan-permasalahan yang berasal dari satu-satunya BKM yang berada di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang yang disebabkan oleh penunggakan cicilan dari masyarakat Kotalama yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat dari 569 KSM terdapat 329 KSM mengalami kemacetan untuk mengembalikan dana bantuan P2KP ini tepat waktu Sehingga modal yang menguatkan BKM pun menjadi berkurang hal ini menyebabkan terhambatnya perguliran kembali atau perputaran dana tersebut oleh karena kurang pemahaman dan persamaan pandangan dalam hal dana. Permasalahan-permasalahan lain dalam BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang adalah permasalahan internal dari dalam BKM yaitu Kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Dari fakta ini, pelaksanaan P2KP masih memiliki masalah yang harus segera dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan P2KP 2007 – 2009 minim penyimpangan.

Dalam konteks ini, maka peneliti berminat untuk meneliti implementasi proyek penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Dengan judul penelitian :

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Malang (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang tersebut dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa peran pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan kedungkandang Kota Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Secara praktis, untuk sumbangan pemikiran bagi pelaku pembangunan di masyarakat, terutama pemerintah kota Malang mengenai mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan terhadap pembangunan di masyarakat yang tepat sasaran.

2. Secara akademik, untuk memberikan kontribusi konsep pembangunan yang berdimensi kerakyatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang ada dalam komunitas masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka diuraikan pengertian Peranan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Kemiskinan, dan Konsep Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai fokus penelitian, situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini dikemukakan mengenai kesimpulan atas data yang dihasilkan dalam penelitian dan serta dikemukakan tentang saran-saran hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

1. Pengertian Peranan

Istilah peranan bukan lagi merupakan kata yang terlalu asing bagi kita, karena istilah ini telah sering dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Poerwodarminta (2005, 854) menyatakan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Dalam pengertian sosiologi, peranan merupakan perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan kata lain, peranan ialah pengejawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Menurut Wojowasito (1974, h.67), peranan ialah dua orang atau lebih yang menjadi atau melaksanakan sesuatu yang khas. Jadi peranan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatan yang khas.

Menurut Soekanto (1990, h.208), menyampaikan pengertiannya sebagai berikut:

“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”

Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya oleh karena itu Soekanto (1990, h.269) juga mengatakan

” pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu pula menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat diramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dengan demikian orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya”.

Dari hasil pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan aspek-aspek dinamis dari seseorang dalam organisasi maupun di dalam kehidupannya. Peranan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Atau dapat pula diberikan pengertian bahwa peranan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya, baik dalam berhubungan dengan pejabat, pemimpin bagian atau seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan juga adanya suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan status kedudukannya. Peranan ini lebih bersifat dinamis dan aktif.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. (Budyanto, 2000, h.25).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah

merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah dapat berupa pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah provinsi, yakni terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yakni terdiri dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

3. Peran Pemerintah Daerah

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 32 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka dimulai suatu era baru dalam pemerintahan dengan otonomi luas, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri (Kaloh, 2002.h 128)

Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dalam suatu kerangka kebijaksanaan yang dimulai dari hal berikut :

- a. Pemerintah daerah melakukan pendekatan secara benar dengan menggunakan indikator-indikator yang baku berpedoman pada BPS dengan karakteristik daerah. Sehingga dapat diketahui secara benar siapa orang miskin itu dan dimana mereka tinggal.

- b. Pemerintah daerah mengidentifikasi tipe dan pola kemiskinan yang disesuaikan dengan tempat tinggal keluarga miskin tersebut, seperti di wilayah pantai, wilayah terpencil, wilayah pedesaan, wilayah kumuh perkotaan dan wilayah transmigrasi. Mengingat masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik wilayah tersendiri sehingga memerlukan pola intervensi yang tersendiri pula.
- c. Pemerintah daerah melakukan intervensi melalui kebijakan pembangunan yang menggunakan tiga pendekatan yaitu : *pertama*, menyediakan program-program yang ditujukan untuk membangun aspek manusia seperti pendidikan bagi anak usia sekolah keluarga miskin, kesehatan bagi keluarga miskin, memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya. *Kedua*, menyediakan program-program yang diharapkan dapat mendorong kesempatan kerja dan berusaha yang produktif dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin. *Ketiga*, menyediakan program-program yang ditujukan untuk membangun lingkungan fisik masyarakat miskin seperti jalan, jembatan, dan sarana social-ekonomi bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat memiliki akses ke pusat kegiatan.
- d. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin per tahun untuk mengetahui apakah masyarakat miskin di kabupaten/kota atau kecamatan makin berkurang. Hasil temuan ini menjadi input pada penyusunan program di tahun berikutnya. (Kaloh, 2002, h. 137-138)

Program-program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu bukan saja pada proses perencanaan, tetapi pada sasaran yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing wilayah tersebut. Pemikiran seperti ini sebenarnya ingin menyempurnakan pendekatan yang selama ini diterapkan dalam pembangunan yaitu pendekatan penyeragaman dimana suatu program pembangunan diterapkan di semua wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, pemberdayaan suatu masyarakat harus diupayakan agar dapat berorientasi pada masyarakat itu sendiri, sehingga peran pemerintah yang selama ini berada di depan akan bergeser sebagai fasilitator masyarakat. Adapun perubahan paradigma peranan pemerintah tersebut antara lain :

- a. Pelaksana menjadi fasilitator
- b. Memberikan instruksi menjadi melayani masyarakat
- c. Mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.

- d. Bekerja untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi (Kaloh, 2002, h. 132)

Dengan melihat arah baru pendekatan pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat menjalankan peranannya sesuai dengan kondisi perubahan tersebut dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada asas-asas keterbukaan, demokrasi, dan partisipasi (Kaloh,2002). Sehingga jelas bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan bukanlah seperti peran yang selama ini dilakukan sebagai pelaksana, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang memberikan iklim kondusif bagi suksesnya penyelenggaraan dan proses pembangunan masyarakat.

Mengingat penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya baik keterpaduan sasaran, keterpaduan program-program yang disiapkan pemerintah daerah, maupun keterpaduan pelaku penanggulangan kemiskinan yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam hubungan ini pemerintah daerah harus dapat memadukannya baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya (Kaloh,2002, h. 138)

Dalam era otonomi daerah ini masalah kemiskinan dapat dijadikan barometer bagi sukses tidaknya pembangunan di daerah atau bahkan dapat menjadi prestise politis bagi kepala daerah yang bersangkutan dalam memimpin daerah tersebut.

Menurut Kaloh (2002, h. 138) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai program konkrit dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Apakah pemerintah daerah memiliki rencana untuk penanggulangan kemiskinan untuk daerahnya.

Dengan adanya rencana induk ini bisa kita lihat keseriusan pemerintah dalam mawujudkan usaha pengentasan kemiskinan, selain itu rencana induk yang ada juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi perjalanan rencana tersebut.

- b. Apakah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan cukup proporsional dalam APBD sebagai program kerja pemerintah selama

satu tahun anggaran. Adanya alokasi dana untuk program ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pendanaan ini sangat vital mengingat bagaimanapun bagus suatu rencana induk, tetapi jika tidak diimbangi dengan dana yang cukup, rencana tersebut tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, pendanaan ini juga digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

c. Apakah ada forum rapat rutin penanggulangan kemiskinan

Seperti kita tahu bahwa fungsi pemerintah pada masa otonomi daerah adalah menjadi fasilitator atau memadukan berbagai pihak yang terkait pada program ini, maka berbagai bentuk pertemuan atau rapat untuk mengkoordinasikan pihak-pihak perlu dilakukan. Sehingga dapat dikatakan apabila pemerintah tidak mengadakan berbagai pertemuan atau rapat rutin. Berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan programnya.

d. Apakah dilakukan evaluasi rutin tahunan

Diatas sudah disebutkan bahwa program merupakan perwujudan konkrit dari suatu rencana, maka suatu program tidak bisa dilepaskan dari kegiatan evaluasi untuk menilai kegiatan atau program tersebut, baik menilai perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai dengan pengontrolan/pengawasan. Dimana hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk membuat rencana baru yang lebih baik. Sehingga kegiatan ini juga tidak bisa ditinggalkan dalam melihat keseriusan pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Indikator diatas bukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, tetapi semata-mata untuk mengetahui keseriusan pemerintah dalam program ini. Dengan melihat beberapa indicator diatas, harapannya kita bisa menilai apakah pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan ini atau tidak.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam P2KP

Dalam buku pedoman P2KP peran pokok pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan P2KP adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya yaitu Kota Malang fungsi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
- b. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut ke Sekretariat P2KP Pusat, dengan tembusan ke BaPPeda Tingkat I
- c. Melakukan pemasyarakatan program kepada aparat di kecamatan
- d. Membantu pelaksanaan P2KP pada wilayah kecamatan, bila diperlukan.
- e. Membantu merealisasi Forum Konsultasi penanggulangan kemiskinan DATI II
- f. Melakukan Monitoring kegiatan pelaksanaan program dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan

B. Pemberdayaan (*Empowerment*)

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang. Paradigma Pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau

proses untuk memperoleh daya/kemampuan/kekuatan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004, h.77).

Senada dengan Sulistiyani, Kartasasmita (1996) dalam Prasojo (2004, h.14), menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.”

Dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki daya/kemampuan, akan tetapi masyarakat yang memiliki daya/kemampuan yang masih terbatas, nantinya dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Sedangkan pada Hikmat dalam Prasojo (2004, h.12), menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif.”

Serta Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. (Rukminto Adi, 2002, h.162-163) dalam Prasojo (2004, h. 12)

Sementara itu Ife (1995, h.182) dalam Prasojo (2004, h.13) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di

dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Terkait dengan itu, Sutrisno (2000, h.185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Dari berbagai pengertian-pengertian pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan dimaksudkan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Melalui pendekatan pemberdayaan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sebagai modal dasar pembangunan, serta memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

2. Cara Memberdayakan Masyarakat

Dubois dan Miley (dalam Suharto,2006, h. 68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (*Client Partnerships*).
- b. Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga rahasia klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Cook dan Maculay (1997) berpendapat bahwa pemberdayaan lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya serta keputusan-keputusan serta tindakan-tindakannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Cook dan maculay (1997) menawarkan pendekatan pemberdayaan dalam kerangka dasar yang dapat dilihat dari akronim "ACTORS" yang terdiri atas:

- a. *Authority*, yaitu memberi wewenang kepada kelompok atau masyarakat untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi suatu milik sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dan keinginan mereka menuju perubahan yang lebih baik.
- b. *Confidence* dan *competence*, yaitu menimbulkan rasa percaya diri dan melihat kemampuan mereka untuk mengubah keadaan mereka.

- c. *Trust*, yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi merubah dan mereka harus bisa.
- d. *Opportunity*, yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat sendiri.
- e. *Responsibility*, yaitu dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan, sehingga dengan penuh tanggungjawab untuk berubah menjadi lebih baik.
- f. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam kajian dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, budaya, social dan sebagainya yang akan dilakukan secara simultan tanpa dominasi salah satu faktor.

3. Kendala Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Prasojo (2004, h.11), mengungkapkannya yaitu permasalahan tersebut khususnya menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melakukan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan sebagainya.

Lebih lanjut Prasojo (2004, h.11), menjelaskan permasalahan lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. *Diskontinuitas dan diskoordinasi*, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh LSM.
2. *Disinformasi program*, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut terkadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. *Disorientasi*, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak

nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.

4. *Generalisasi*, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut, maka pendekatan pembangunan dan pemberdayaan yang tidak bersifat monolitik dan lebih bersifat dinamis.
5. *Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional*, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan di lapangan.
6. *Indikator yang tidak tepat*, yaitu pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Berbagai hambatan-hambatan yang telah diungkapkan oleh Prasojo merupakan hambatan yang umumnya melekat pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Baik faktor internal maupun faktor eksternal harus dicari upaya pemecahannya agar pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pembangunan yang berpusat pada masyarakat menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Paradigma ini juga menuntut perubahan pola. Pola dari atas ke bawah yang selama ini lebih kuat daripada dari bawah ke atas harus digeser dengan memberikan tempat bagi keterlibatan semua tingkat. Dalam hal ini pemerintah bergeser dari penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik dan mobilisator serta peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung (Prasojo, 2004, h.20) maka pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, dengan

memperhatikan prinsip-prinsip yang terkait dalam pembangunan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Faktor-faktor struktural yang berakar dalam suatu masyarakat,
2. Perhatian terhadap hak-hak dasar manusia,
3. Prinsip kesinambungan (*sustainability*),
4. Hubungan antara individu dan politik,
5. Kepemilikan masyarakat baik dalam konteks material maupun struktur dan proses,
6. Kepercayaan terhadap kekuatan sendiri (*selfreliance*),
7. Ketidaktergantungan kepada pemerintah,
8. Penetapan visi jangka panjang dan tujuan intermediasi yang akan dicapai,
9. Pemberdayaan berdasarkan *organic development* dan faktor-faktor lainnya.

Sejak reformasi 1998, negara dan pemerintah memiliki komitmen kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia dan masyarakat. Hal ini paling tidak ditandai dengan beberapa perubahan dan pembuatan Undang-Undang yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Jika sebelum reformasi pemerintah pusat memegang peranan yang sangat dominan dalam pembangunan, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berpindah tidak saja ke pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat daerah.

Dari sudut pandang pemerintahan dan masyarakat daerah, Prasojo (2004, h.22) memberikan tiga *point* nilai utama kebijakan desentralisasi ini adalah:

1. Perwujudan *political equality*, yakni terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat nasional,
2. *Local accountability*, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat di tingkat lokal,
3. *Local responsiveness*, yakni pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.

B. Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990, h.179) adalah berasal dari kata “miskin” yang berarti tak berharta, kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) Sedangkan kemiskinan diartikan selalu berkaitan dengan orang atau kelompok yang serba kekurangan, menyangkut kebutuhan pokok minimum atau mendasar (makanan, pakaian dan tempat tinggal) yang tidak memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak.

Pengertian kemiskinan adalah suatu konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak dari istilah pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Sumodiningrat (1997, h. 1) bahwa :

“karena dalam setiap pembahasan tentang pembangunan pemecahan kemiskinan mendapat tempat yang cukup penting. Pada tahap ini kemiskinan di pandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, ditandai dengan adanya, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi kesenjangan, secara bersama kenyataan tersebut bukan saja meningkatkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak beres dalam pembangunan”

World Bank dalam Suryono (2001, h.112) kemiskinan sebagai ketidak mampuan seseorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang/kelompok orang diluar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari sebagai akibat tidak berdayanya pengaruh terhadap kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang berinteraksi satu sama lain.

2. Faktor penyebab kemiskinan.

Menurut Kartasmita (1996, h.14-15), penyebab kemiskinan ada empat hal, yaitu:

- a. Rendahnya taraf pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Untuk mencegah ini oerlu adanya program wajib belajar sembilan tahun dan juga otonomi pendidikan
- b. Rendahnya derajat kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terjaminnya kesehatan seseorang akan

membuat dirinya rajin bekerja sehingga pendapatan dapat meningkat dan kesejahteraan juga meningkat.

c. Terbatasnya lapangan kerja

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.

d. Kondisi terisolir

Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berbudaya karena terpeleceh sehingga tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Penyebab kemiskinan menurut Bawsir dalam Suryono (2004, h. 101), antara lain:

- a. Kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin karena keterbatasan alamiah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya;
- b. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan karena faktor-faktor kebudayaan yang semakin melestarikan kemiskinan di wilayah tersebut;
- c. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan karena faktor-faktor buatan manusia, misalnya kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, KKN, serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu.

3. Ciri-ciri kemiskinan

Masalah kemiskinan yang begitu kompleks, maka untuk dapat memahami secara jelas siapa saja yang termasuk kedalam kelompok miskin kita perlu mengetahui ciri-ciri kemiskinan. Menurut Bank Dunia ada 5 ciri dari kelompok penduduk miskin, yaitu Pertama, mereka pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal maupun ketrampilan yang cukup sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak mempunyai syarat untuk memperoleh kredit perbankan, seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling pada "lintah darat" yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang tinggi.

Ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat, sekolah dasar (SD). Waktu mereka tersisa habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa untuk belajar juga anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun temurun mereka terjatuh dalam keterbelakangan dan berada dibawah garis kemiskinan.

Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah kaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Karena petani bekerja dengan musiman, maka kesinambungan kurang terjamin banyak diantara mereka lalu menjadi "pekerja kasar" (*self employed*) berusaha apa saja (sektor informal). Tingkat upah rendah sehingga mereka dibawah garis kemiskinan.

Kelima, banyak dari mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (*skill*) atau pendidikan yang memadai.

Menurut Hasan yang dikutip oleh Sumodiningrat dkk (1997, h 15) menyebutkan bahwa kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

"Pertama, sebagian besar penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan tetap. Kedua, pada umumnya penduduk miskin bekerja secara penuh (*full timer*). Ketiga, mereka banyak yang tidak mempunyai peralatan produksi, peralatan kerja yang memadai. Keempat, sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah"

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.. Dalam memenuhi kebutuhan pokok ini maka pengaruh ruang lingkup perlu diperhitungkan.

Dengan mengenali ciri-ciri kemiskinan seperti yang diungkapkan diatas, oleh karena itu dapat disederhanakan bahwa seseorang/keluarga atau kelompok penduduk yang mengalami kemiskinan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagian besar bermukim di daerah pedesaan.
2. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal maupun keterampilan (*skill*)

3. Tidak mempunyai syarat yang bisa dipenuhi untuk kredit Bank, sehingga tidak mempunyai akses modal.
4. Anggota rumah tangga banyak
5. Tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah.
6. Tempat tinggal, makan, pakaian, penyediaan air bersih dan listrik penerangan sangat memprihatinkan.
7. Sebagian besar mereka bekerja disektor pertanian dengan lahan terbatas dan pengolahannya masih tradisional.
8. di daerah perkotaan biasanya mereka adalah pengangguran atau setengah pengangguran, bekerja sebagai pengrajin kecil, pegawai kecil sebagai buruh/pegawai kecil swasta/pemerintah dan sektor lainnya.

4. Kemiskinan di Perkotaan

Kemiskinan yang ada di perkotaan sebagian besar disebabkan oleh arus urbanisasi yang terus meningkat. Angka kriminalitas yang terus meningkatkan sebagai akibat dari angka pengangguran yang tinggi merupakan salah satu indikator dari adanya kemiskinan di perkotaan. Selain itu banyaknya pemukiman kumuh di daerah perkotaan juga dapat digunakan untuk melihat adanya kemiskinan di perkotaan.

Banyak masyarakat dari pedesaan yang pindah ke kota dengan bermacam alasan. Kemiskinan di desa yang dikarenakan terdesaknya pengolahan pertanian secara manual menjadi teknik, dan bertambahnya penduduk tapi sumber daya alam kurang menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Sebuah penelitian tentang migrasi desa-kota terkemuka setelah mengadakan dua dekade menemukan banyak bukti bahwa mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi (Effendi, 1995, h. 60). Namun karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sebuah kota tidak cukup memadai bagi masyarakat, maka terjadilah kemiskinan di perkotaan

Untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan di kota, masyarakat harus mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi, sedangkan masyarakat yang berurban ke kota. Sebagian besar adalah mempunyai pendidikan dan kemampuan yang terbatas. Dan karena inilah kemiskinan

banyak terjadi pengangguran di daerah perkotaan. Karena daerah perkotaan menggunakan bahan untuk sumber mata pencaharian seperti halnya di desa.

5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dalam memberantas kemiskinan di semua sektor kehidupan adalah upaya yang memihak, memberikan perlindungan, dan bukan hanya persamaan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya atau membiarkan masyarakat miskin itu membenahi sendiri sistem sosial dan memperkuat posisi tawar mereka. Adapun strategi pembangunan untuk menekan tingkat kemiskinan antara lain yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek yang mengakibatkan pentranferan sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah. Kedua, penyediaan fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah. Ketiga, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan keempat, pengembangan kelembagaan (Tjokrowinoto dalam dewanta, 1999 h.28)

Kesuksesan program pengentasan kemiskinan ini ditentukan oleh sejauh mana pemerintah secara aktif melibatkan organisasi lokal, disamping memaksimalkan sinergisme antarlembaga pemerintah, LSM, lembaga swasta yang secara bersama-sama diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu mengurangi secara gradual ketrelibatannya dalam penentuan jenis kebijakan yang harus diambil, karena dapat mengakibatkan ketergantungan dan tidak menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kepentingan diri sendiri.

Adanya kerjasama tersebut mutlak diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat tepat mencapai sasarannya. Untuk mendukung hal ini pemerintah menuangkan kebijakan pengentasan kemiskinan tiga arah kebijaksanaan, yaitu :

1. Kebijakan tidak langsung, yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin setiap upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Kebijakan langsung, yang ditunjukkan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kebijakan khusus, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung

terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan (Kartasmita,1996, h 241-242)

Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan multidimensi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada 4 fokus kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu (1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar; (2) perlindungan sosial; (3) penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan; serta (4) perluasan kesempatan berusaha. Sehubungan dengan itu, usaha untuk menanggulangi kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak, baik instansi pemerintah, instansi swasta, maupun masyarakat pada umumnya.

C. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005]

Mengingat bahwa proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah landasan dan memicu tumbuhnya sinergi gerakan bersama dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka diperlukan rumusan visi, misi, dan prinsip dan nilai yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan perilaku dan arah bagi semua pelaku P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), maupun menjadi tumpuan lembaga-lembaga masyarakat dalam mengembangkan program-program kemiskinan.

1. Visi P2KP

Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan sehat, produktif dan lestari

2. Misi P2KP

Masyarakat mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun kelompok peduli setempat untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Misalnya adalah memberdayakan masyarakat perkotaan terutama masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergi antar masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya.

3. Nilai-Nilai dan Prinsip yang melandasi P2KP

Nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang bersifat universal, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang melandasi pelaksanaan P2KP dan dianut oleh lembaga BKM adalah sebagai berikut :

a. Nilai-nilai universal kemanusiaan (Gerakan Moral)

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah :

(1) Jujur

Kejujuran adalah dasar dari semua nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa kejujuran kemajuan dan keberhasilan tidaklah mungkin bagi organisasi apapun. Pada akhirnya ketidakjujuran (walaupun awalnya kecil) akan menghilangkan kepercayaan (trust), yang merupakan aset terbesar lembaga (atau perorangan), dan secara pasti akhirnya merusak pondasi-pondasi pembangunan. Kebohongan, walaupun kecil, bagaikan suatu karat yang bisa menyebar dan merusak sendi-sendi kredibilitas organisasi.

Jujur dalam hal ini adalah berani mengungkapkan apa adanya dalam arti mengungkapkan kebenaran atau apa yang sebenarnya tanpa menambah, mengurangi atau menyembunyikan atau menutupi. Pada dasarnya kejujuran merupakan dasar dari semua kebijakan dan merupakan modal awal (seed capital) bagi kesuksesan BKM, karena

tanpa adanya kejujuran jaminan untuk terjadinya pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terjadi.

(2) Dapat Dipercaya

Program P2KP dalam mengelola dana yang telah diberi oleh pemerintah harus dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebenarnya yang akan dapat sesuai dengan tujuan dari program ini yaitu untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pelaksana program P2KP harus dapat dipercaya karena jika tidak maka dana yang akan dikelola tidak akan sampai pada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tujuan awal program ini dibentuk.

(3) Ikhlas

Ikhlas dalam hal ini adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan termasuk dalam imbalan ini adalah syarat (*unconditional*). Artinya pemberian ini ditentukan bukan oleh orang yang akan diberi tetapi oleh nilai yang ingin diwujudkan oleh yang memberi, tidak peduli yang akan diberi mungkin tidak berterima kasih atau malah mungkin orang yang membenci si pemberi. Memberi tanpa menuntut imbalan atau lebih tepat pengorbanan diri inilah yang menjadi pupuk yang menyuburkan tumbuhnya kapital sosial dan menjadi perekat yang sangat kuat dari ikatan sosial antar warga di kelurahan yang bersangkutan. Bila suatu komunitas kehilangan nilai ikhlas ini sehingga tidak mampu lagi berkorban bagi sesama maka yang tumbuh berkembang adalah sifat mementingkan diri sendiri yang pada gilirannya akan meruntuhkan ikatan sosial yang ada. Jenis pengorbanan yang dilakukan secara sadar sebagai pilihan bebas semacam ini hanya mampu dilakukan oleh makhluk ciptaan yang paling luhur seperti manusia dan pengorbanan inilah yang menjadi inti semangat pengabdian bagi mereka yang siap menjadi pemimpin. Selain itu keikhlasan dan pengorbanan merupakan daya penggerak tertinggi bagi suatu tindakan kolektif dalam masyarakat.

(4) Adil

Adil dalam hal ini diartikan sebagai perlakuan orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan. Jadi kalau kita ingin dihargai ya hargailah orang lain, kalau kita ingin pendapat kita didengar ya dengarkan juga pendapat orang lain, dsb. Ini juga berarti mendudukkan diri kita pada posisi orang lain, misalnya kita suka pedas orang lain tidak, maka kita harus mampu mendudukkan diri kita seperti orang yang tidak suka pedas. Kita ingin diperlakukan apa dalam kondisi seperti itu.

(5) Kesetaraan

Dalam melaksanakan program ini semua orang adalah sama tidak membedakan ras, suku dalam pemberian pinjaman dana. Dan dalam keanggotaan Badan Keswadayaan Masyarakat tidak boleh membedakan yang kaya dan yang miskin menganggap orang yang kaya lebih pantas menduduki sebagai anggota dari Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri.

(6) Kesatuan dalam keragaman

Dalam keanggotaan yang terdiri dari bermacam-macam orang harus dapat menyatukan tujuan dan pikiran dari masing-masing orang tersebut agar tidak terjadi perpecahan dalam lembaga tersebut.

b. Prinsip-prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance).

Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP adalah:

(1) Demokrasi

Dalam setiap kegiatan mulai dari awal sampai akhir demokrasi harus diterapkan dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Keputusan ini diutamakan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat, misalnya dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat yang didapatkan melalui hasil rapat.

(2) Partisipasi

Masyarakat memiliki peranan yang amat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan karena proyek ini dijalankan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri, semakin kurangnya partisipasi masyarakat berarti semakin rendah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan proyek.

(3) Transparansi

Informasi mengenai pelaksanaan proyek terutama masalah keuangan dan prosedur pencairan dana harus dapat diakses secara jelas dan mudah agar semua pihak yang terkait dan terlibat sadar akan tanggung jawabnya masing-masing, kolusi dan praktek penyimpangan yang lainnya dapat diminimalisir bahkan dihapus.

(4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam proyek ini dapat dilihat dari kemampuan para pelaksananya, apakah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. prinsip ini juga tak lepas dari pengawasan dan penilaian masyarakat sebagai pengamat dan evaluator yang amat penting dalam menentukan akuntabilitas dalam pelaksanaan P2KP.

(5) Desentralisasi

Sebagai upaya desentralisasi, pelaksanaan proyek harus dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang terlibat dalam proyek itu sendiri. Mereka membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya.

c. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep tridaya.

d. Konsep tridaya mencakup:

- (1) Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*); Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
- (2) Pengembangan Masyarakat (*Social Development*); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;
- (3) Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*); dalam upaya menyeraskan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

4. Tujuan P2KP

Adapun tinjauan dari P2KP yaitu (<http://www.p2kp.org/>):

- (1) Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya.
- (2) Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM).

Tujuan P2KP adalah mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui:

- 1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru;
- 2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang *item a*;
- 3) Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok;
- 4) Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan;

- 5) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Pada dasarnya kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat, dan para pihak terkait (*stakeholder*).sasaran P2KP di masyarakat adalah KSM yang terdiri atas perorangan, maupun keluarga (miskin) yang tinggal diwilayah perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan (Faskel).

5. Strategi P2KP

- a. Penyelenggaraan konsep tribina (bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan);
- b. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif;
- c. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru;
- d. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan; dan
- e. Pendampingan pada KSM.

6. Azaz P2KP

Dalam penyelenggaraan P2KP, semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada asa-asa sebagai berikut:

- 1) Keadilan

Agar pemberian dana bantuan sesuai dengan ketentuan, sehingga antara penerima bantuan yang satu dengan yang lain tidak dibedakan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka haruslah berdasarkan asas keadilan. Hal ini diterapkan pada setiap

kegiatan, contohnya pada saat menilai kelayakan proposal kelompok sasaran serta uji dari Badan Keswadayaan Masyarakat.

2) Kejujuran

Kejujuran dapat dilihat oleh pihak Badan Keswadayaan Masyarakat melalui survey sebelum pencairan dana, apakah dalam proposal sesuai dengan keadaan sebenarnya, laporan tahunan dari Badan Keswadayaan Masyarakat juga dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat umum untuk melihat kejujuran dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat.

3) Kesenjangan kaum laki-laki dan perempuan

Tidak ada perbedaan gender dalam pemberian dana bantuan dan juga dalam penentuan pengurus untuk pelaksanaan proyek.

4) Kemitraan

Antara anggota didalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat haruslah saling membantu sesuai dengan tujuan utama P2KP yaitu mengutamakan institusi local yang nantinya akan madiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat anggota. Kemitraan juga akan muncul dalam hubungan antara Badan Keswadayaan Masyarakat dengan kelompok sasaran.

5) Kesederhanaan

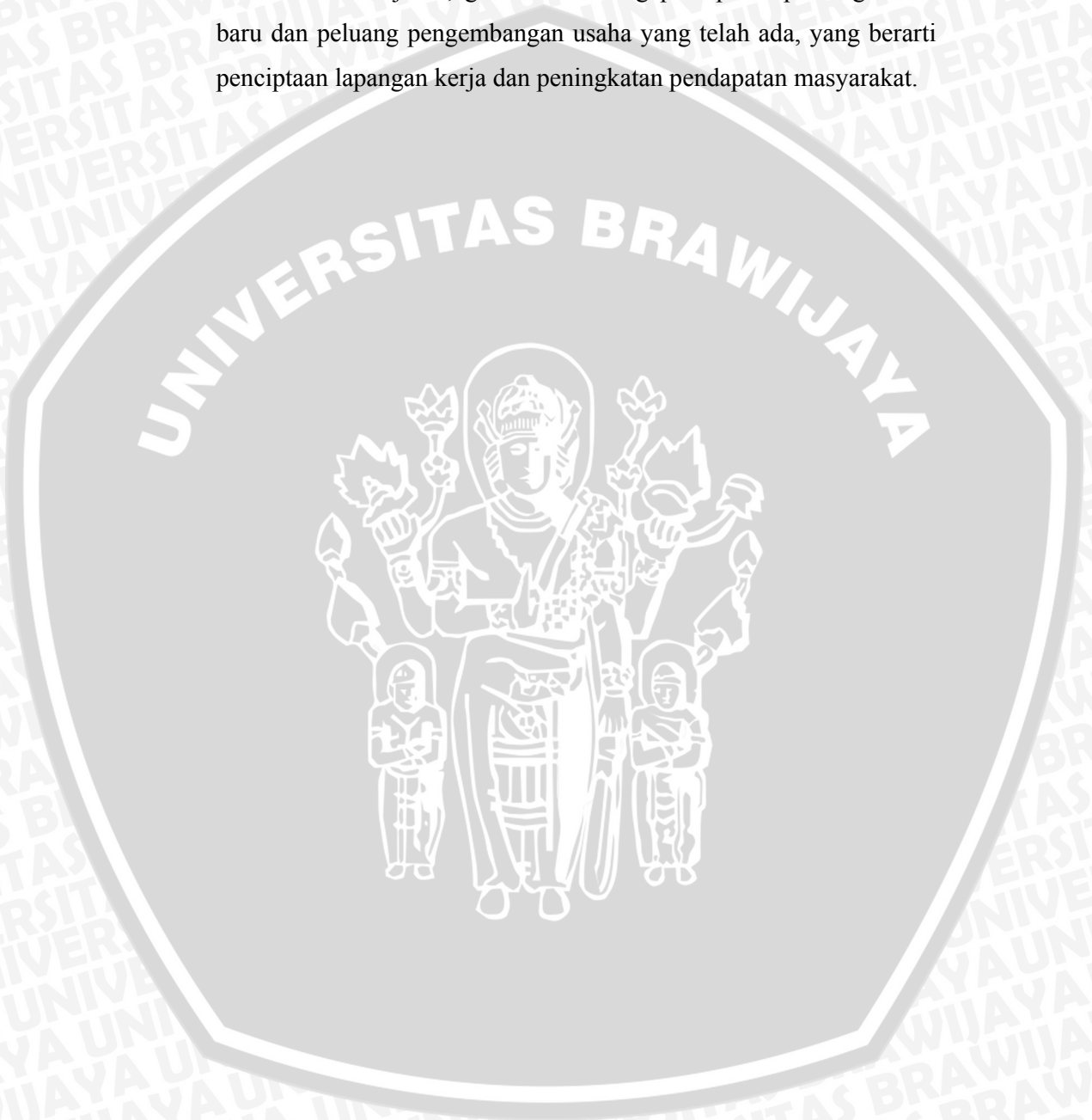
Kesederhanaan maksudnya adalah kemudahan dan kepraktisan dalam prosedur pencairan dan pengambilan dana.

7. Komponen P2KP

Komponen P2KP dikelompokkan atas:

- a. Komponen fisik, komponen ini meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan/desa setempat;
- b. Komponen ekonomi skala kecil, yang dimaksud adalah meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam suatu ksm;

- c. Komponen pelatihan, kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga pada kelurahan/desa setempat. Misalnya ketrampilan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan menajerial, guna mendukung penciptaan peluang usaha baru dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dari gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005 h.63)

Metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian (Sevilla, 1993 h.71)

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Menurut Ndraha (1991 h.101) adalah ” prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan dan perilaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri atau penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan obyeknya di lingkungan subyek itu”

Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk dapat menjelaskan berbagai makna data yang terkumpul

Tujuan penelitian kualitatif menurut Ndraha (1991 h.105) ”penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya obyek pada suatu masa atau saat tertentu, dimana ini akan dapat:

1. Melukiskan keadaan obyek pada suatu saat
2. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari pada suatu peristiwa
3. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau peraturan.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak (Moleong, 2006, h.94). Adanya fokus penelitian ini akan memberikan arahan agar peneliti terhindar dari pengumpulan data yang tidak perlu dan juga untuk memandu jalannya penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang meliputi :
 - a) Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam proses penyaluran dana bantuan P2KP.
 - b) Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan program P2KP
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan.
 - 1) Faktor Pendukung
 - a) Sumber Daya Manusia Para pengurus BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
 - b) Faktor kedisiplinan dari anggota KSM di Kelurahan Kotalama
 - 2) Faktor Penghambat
 - a) Masalah permodalan
 - b) Keaktifan dari para Pengurus BKM Sejahtera

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dimana dalam hal ini adalah pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Lama Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kemajuan ekonomi memicu munculnya urbanisasi dari daerah sekitar khususnya wilayah Kota Malang, sehingga memunculkan gejala ruralisasi perkotaan terutama di Kelurahan Kotalama.
3. Kelurahan Kotalama mayoritas penduduknya merupakan warga pendatang, salah satu problema sosial utama bagi masyarakat Kotalama adalah kemiskinan

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti dapat memperoleh atau menangkap keadaan atau fenomena dari obyek yang akan diteliti dengan demikian yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah

1. Kantor BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang
2. Kantor Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
3. Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis Mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dapat digolongkan sebagai berikut

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer yang didapat oleh peneliti berasal dari
 - a) Pengurus BKM
 - b) Masyarakat yang terlibat dalam BKM
 - c) Pegawai Kelurahan Kotalama
 - d) Pegawai BAPPEKO Malang

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian,

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah :

- 1) Buku Monografi semester II Kelurahan Kotalama
- 2) Buku pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
- 3) Buku Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sejahtera Kelurahan Kotalama.

2. Sumber Data

Menurut pendapat Lofland dalam (Moleong, 2006, h. 157) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti.

Sumber data penelitian dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait dengan Peran Pemerintah dalam pelaksanaan P2KP. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang terdiri dari Koordinator dan para staff di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan informan

lainnya bisa berasal dari pegawai Kelurahan di Kelurahan Kotalama, Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang serta anggota KSM

b. Peristiwa

Selain keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengurus UPK dalam melaksanakan tugasnya di kantor BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

c. Dokumen

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, beberapa artikel yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan kemiskinan dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa metode yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis dan sifat yang diperoleh. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif terbagi dalam tiga tipe dasar, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan antara lain dengan pelaku P2KP dan masyarakat yang memanfaatkan proyek tersebut, dan seluruh pihak terkait dengan proyek tersebut dan data yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

- a) Ibu Israpti selaku pegawai Kelurahan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,

- b) Bapak Syarif, SH selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- c) Bapak Dwiyono santoso selaku koordinator 2 BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- d) Maimunah selaku bendahara UPK di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama,
- e) Ibu Endah selaku Kabid Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bappeko Malang,
- f) Bapak Agung selaku staff di kantor Bappeko Malang
- g) Bapak Ridwan salah satu warga RT 3 kelurahan Kotalama
- h) Ibu Siti Solicha selaku anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Brantas 77 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- i) Ibu Istiqomah selaku anggota KSM Panjunan di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- j) Bapak Suyadi selaku anggota KSM Sumber 65 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- k) Ibu Waras selaku anggota KSM Bango 77 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- l) Ibu Siti Aisyah selaku anggota KSM Kotalama 49 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- m) Ibu Supiyah selaku anggota KSM Kebalen 68 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- n) Bapak Mislan selaku anggota KSM Panjunan 47 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
- o) Bapak Agus Subakti selaku anggota KSM Soling 48 di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

2. Observasi

Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara; dan dalam penelitian ini saya tidak melakukan observasi dengan melihat pengerjaan proyek P2KP dan tidak mengikuti musyawarah warga karena

waktu saat saya penelitian tidak tepat dengan adanya program dan musyawarah warga dilaksanakan. Saya hanya datang di kantor BKM untuk mengamati kinerja para pengurus BKM tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari dan meyakinkan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen yang diperlukan untuk menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian ini berupa catatan resmi, arsip, makalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh peneliti:

- a. Buku monografi semester II tahun 2007 Kelurahan Kotalama
- b. Buku pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
- c. Buku Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sejahtera Kelurahan Kotalama.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedomam wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
3. Catatan lapangan, merupakan beberapa catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi utama selama penelitian yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi.

G. Analisa Data

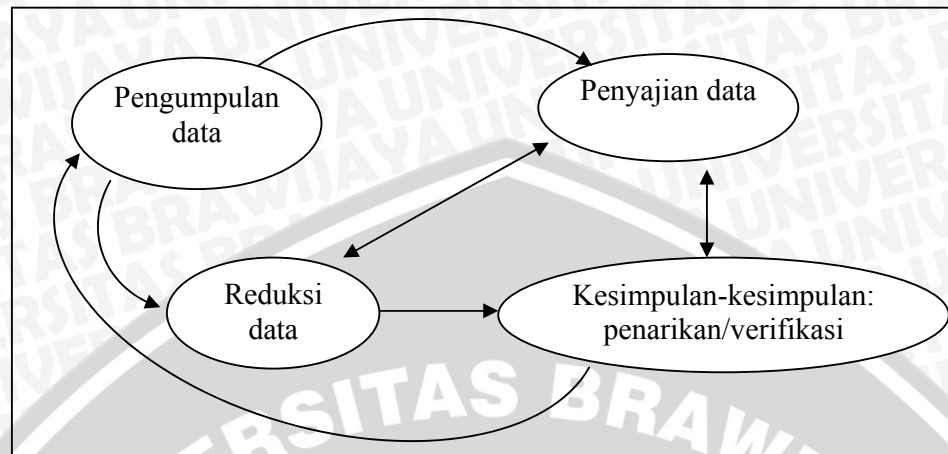
Menurut M. Nazir (2005, h.358) analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca. Tujuan dari analisa adalah untuk mereduksi data agar dapat dikerjakan, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan suatu fenomena yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa adanya.

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode taksonomis, yaitu suatu metode menganalisa data secara lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan batasan-batasan berupa penetapan fokus penelitian dalam upaya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007, h.248), analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun metode yang digunakan dalam analisa data ialah:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir dan mengorganisasikan data.
- b. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan berupa teks uraian.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut valid.

Gambar 1. Proses Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohadi, 1992, h.20

H. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data, derajat kepercayaan/kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standarisasi apa yang digunakan yang disebut keabsahan data (Sugiyono, 2007, h.120) mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*), berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.:
2. Keteralihan (*Transferability*)
Kriteria ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.
3. Kebergantungan (*Dependability*)
Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi, jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan derajat kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa teknik pemeriksaan yaitu:

1. Ketekunan/keajegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2002, h.178) ada 4 (empat) triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
4. Pengecekan data-data melalui perbandingan antara hasil analisis peneliti dengan data yang sebenarnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi geografis obyek penelitian

Kelurahan Kotalama adalah salah satu kelurahan yang berada di jantung kota di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dimana jarak dari pusat pemerintahan Kota Malang adalah 1 km sedangkan jarak menuju ibu kota Propinsi adalah 100 km. Luas wilayah kelurahan Kotalama adalah 1,60 km², terdiri atas 11 Rukun Warga (RW) dan 141 Rukun Tetangga (RT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jodipan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungkandang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mergosono
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo

Wilayah Kelurahan Kotalama terletak pada ketinggian 447 meter di atas permukaan laut, dengan topografi bentuk wilayah 50% datar sampai berombak dan 50% berombak sampai berbukit. Suhu udara minimum 27°C dengan curah hujan 120 mm/tahun

b. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Kotalama sampai dengan tahun 2007, berdasarkan data monografi Kelurahan Kotalama semester II (Dua) bulan Juni s/d Desember Tahun 2007 tercatat sebanyak 29.656 jiwa yang terdiri dari 14.565 jiwa berkelamin laki-laki dan 15.091 jiwa berkelamin perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 9.008 Kepala Keluarga (KK). Kepadatan penduduk di Kelurahan Kotalama adalah 18535 jiwa/km² serta persebaran penduduk merata. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No	URAIAN	2007
1.	Jumlah Penduduk seluruhnya Tahun ini	29656
2	Jumlah Kepala Keluarga	9008
3.	Luas Wilayah	1,60
4.	Kepadatan Penduduk (Jumlah Penduduk : Luas Wilayah)	18535 jiwa/km ²

Sumber: Monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotalama Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-Laki	14.565
Perempuan	15.091
Total Penduduk	29.656

Sumber: Monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Kotalam menurut jenis kelamin tahun 2007 jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 15.091 dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 14.565.

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Kotalama menurut golongan usia pada periode semester II tahun 2007, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Penduduk Kelurahan Kotalama menurut usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-5	2.075
2	6-15	5.589
3	16-60	14.905
4	Diatas 60	1.705
Jumlah		29.656

Sumber: monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usia produktif adalah usia yang terbanyak, yaitu 14.905 jiwa, dan apabila jumlah yang demikian itu dibina dengan baik maka dapat mendukung P2KP secara signifikan.

Berdasarkan data monografi kependudukan Kelurahan Kotalama menurut Agama periode semester II tahun 2007, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotalama Menurut Agama Tahun 2007

Agama	Jumlah (jiwa)
Islam	23.818
Khatolik	192
Protestan	456
Hindu	-
Budha	77
Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME	-
Total Penduduk	29.656

Sumber: Monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi Kelurahan Kotalama pada periode semester II tahun 2007 dapat diketahui penduduk Kelurahan Kotalama mayoritas beragama Islam dengan jumlah 23.818 jiwa, lalu beragama Protestan sebanyak 456 jiwa, Khatolik 192 jiwa, Budha 77 jiwa dan di kelurahan Kotalama tidak terdapat penduduk yang beragama Hindhu dan Penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME

c. Keadaan Mobilitas Penduduk

Keadaan mobilitas penduduk di Kelurahan Kotalama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5
Keadaan Mobilitas Penduduk

No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pindah Datang	74	44	118
2.	Pindah Keluar	128	126	355
3.	Lahir	111	107	218
4.	Mati	24	22	66

Sumber: Monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Mencermati tabel 5 dapat dikerahui bahwa jumlah penduduk pindah keluar lebih besar dibandingkan jumlah penduduk pindah datang. Jumlah penduduk pindah keluar sebesar 355 orang dan jumlah penduduk pindah datang sebesar 118 orang. Angka kelahiran di kelurahan Kotalama sebesar 218 orang dan Angka kematian sebesar 66 orang.

d. Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kotalama

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai dasar untuk pengembangan diri. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Kotalama sangatlah beragam, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kotalama

No	Tingkatan	Jumlah (Orang)
1.	Belum Sekolah	3.509
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	-
3.	Tamat SD/Sederajat	2.087
4.	Tamat SLTP/Sederajat	2.436
5.	Tamat SMU/Sederajat	2.120
6.	Tamat Akademi/Sederajat	209
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	147
8.	Buta Huruf	-

Sumber : Monografi Kelurahan Kotalama, 2007

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kotalama jumlah paling besar adalah lulusan SLTP yaitu 2.436 jiwa sedangkan jenjang pendidikan akademi dan sarjana masih sangat kecil yaitu masing-masing 209 dan 147 jiwa. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan warga di Kelurahan Kotalama karena hanya sebagian kecil masyarakat Kotalama yang menempuh pendidikan sampai ke akademi ataupun sarjana

e. Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Kotalama

Mayoritas penduduk Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang adalah warga pendatang dari Pulau Madura dan identik dengan rusuh serta rawan. Walaupun demikian, menurut saya hal ini tidak sepenuhnya benar. Penduduk Kotalama sebagian besar bekerja sebagai pemulung, tukang becak serta ada juga yang bekerja sebagai pedagang hal ini terlihat di Kelurahan Kotalama terdapat 102 buah kios/toko/warung yang tersebar di kelurahan

Kotalama serta lokasi Kelurahan Kotalama yang berdekatan dengan Pasar Besar yang merupakan salah satu pasar yang terbesar di Kota Malang selain itu di Kelurahan Kotalama juga terdapat Pasar Comboran dan Pasar Kebalen, yang juga merupakan tempat dimana penduduk kelurahan kotalama melakukan aktivitas perdagangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Isprapti selaku salah satu pegawai di Kelurahan Kotalama, beliau mengungkapkan :

“ Penduduk kelurahan kotalama ini sangat miskin dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah serta mata pencaharian yang tidak menentu seperti tukang becak, pemulung, serta pedagang hal ini mengakibatkan penghasilan yang di dapat sangat minim sekali”(Wawancara 25 Juni 2008)

Dengan pendapatan yang relative sedikit penduduk Kotalama mengakui tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Pendapatan Mereka Bekisar antara Rp. 350.000,- hingga Rp. 550.000,- per-bulan. Walau begitu, mereka menyatakan bahwa kehidupan mereka di kota lebih baik daripada mereka tinggal di pedesaan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Ridwan salah satu warga RT 3 kelurahan Kotalama:

“...biarpun disini miskin mbak... tapi lebih baik tinggal di Kotalama dari pada di desa. Apabila di desa, kalau miskin ya tambah miskin, tapi kalau di kota, meski berat, tapi banyak hiburannya, banyak temannya, ramai dan gampang cari uang, tidak seperti di desa, cari uang satu rupiah saja susah tapi kalau disini mbak Rp. 350.000,- sampai Rp. 550.000,- per-bulan masih bisa mbak...” (Wawancara 19 juni 2008)

Berdasarkan latar belakang keadaan ekonomi yang relative rendah maka kelurahan Kotalama merupakan salah satu kelurahan yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang tercatat sebanyak 1.240 KK

f. Kelembagaan di Kelurahan Kotalama

Kelembagaan yang ada di kelurahan Kotalama antara lain lembaga pemerintahan yang terdiri dari Kinerja Rukun Warga (RW) dan Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kotalama salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Berdasarkan data monografi semester II tahun 2007 kelurahan Kotalama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki jumlah

anggota dan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) seperti pada tabel 7.

Tabel 7
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Anggota LPMK	15 orang
2.	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	
	a. Jumlah KPM se Kelurahan	17 orang
	b. KPM yang terlatih	17 orang
	c. KPM yang tidak terlatih	-

Sumber : monografi Kelurahan Kotalama,2007

Jumlah anggota LPMK Kelurahan Kotalama berdasarkan tabel 9 adalah 15 orang. Sedangkan jumlah KPM Kelurahan Kotalama adalah 17 orang dengan jumlah KPM yang terlatih sebanyak 17 orang dan tidak terdapat KPM yang tidak terlatih.

Lembaga ini bersama dengan Lurah Kelurahan Kotalama berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotalama yang dibantu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK), Kasi Pemerintahan yang dibantu seorang staf, dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Selanjutnya, salah satu lembaga yang terdapat di kelurahan Kotalama adalah Lembaga Pendidikan, dimana lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8
Lembaga Pendidikan

No	URAIAN	2007		
		Jml	Jml Guru/ dosen	Jml Murid/Siswa/ Mahasiswa
1.	TK	2	6	85
2.	SD/Sederajad	15	102	2642
3.	SLTP/Sederajad	1	24	125
4.	SLTA/Sederajad	-	-	-
5.	Perguruan Tinggi	-	-	-

Sumber: Monografi Kelurahan Kotalama, tahun 2007

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa Lembaga pendidikan di kelurahan Kotalama sangat sedikit sekali dimana hanya terdapat 2 buah TK dengan

jumlah murid 85 anak dan 15 buah SD/Sederajat dengan jumlah murid 2642 anak serta 1 buah SLTP/ Sederajat dengan jumlah murid 125 anak.

g. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Kotalama

Berdasarkan data dari BAPPEKO Malang (2007) jumlah penduduk miskin di Kota Malang adalah sebesar 24.272 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah RTM			
		Hampir Miskin (HM)	Miskin (M)	Sangat Miskin (SM)	Total
1.	Kd.Kandang	4.021	1.858	735	6.632
2.	Sukun	3.957	1.752	546	6.255
3.	Klojen	2.276	842	289	3.407
4.	Blimbing	2.785	1.127	246	4.158
5.	Lowokwaru	2.354	1.134	332	3.820
Jumlah		15.393	6.713	2.166	24.272

Sumber : Basis Data, 2007

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Kedungkandang tergolong tinggi dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Malang, dengan 6.632 RTM telah menyumbang 18,64 % tingkat kemiskinan di Kota Malang.

Sedangkan rincian RTM di Kelurahan-kelurahan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Jumlah rumah Tangga Miskin (RTM) per kelurahan di Kota Malang

No	Kelurahan	Jumlah RTM				
		HM	M	SM	Total	% Kemiskinan
1.	Arjowinangun	164	66	27	257	15,08
2.	Tlogowaru	197	241	101	539	45,03
3.	Wonokoyo	198	74	38	310	24,24
4.	Bumiayu	348	79	13	440	17,05
5.	Buring	212	215	58	485	16,66
6.	Mergosono	568	247	54	869	20,79
7.	Kotalama	890	258	58	1204	18,64
8.	Kedungkandang	407	101	18	526	24,37
9.	Sawojajar	178	63	8	249	4,24
10.	Madyopuro	302	75	18	395	8,751
11.	Lesanpuro	445	172	46	663	16,25
12.	Cemorokandang	112	267	316	669	33,37
	Jumlah	4021	1858	753	6632	17

Sumber : Basis Data, 2007

Tingkat kemiskinan di Kelurahan Kotalama tergolong tinggi hal ini terlihat dari data Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per kelurahan di Kota Malang yaitu 18,64%.

Jumlah RTM di Kelurahan Kotalama terbagi kedalam beberapa tingkatan yaitu hampir miskin sebanyak 890 KK, RTM miskin sebanyak 258 KK, RTM sangat Miskin sebanyak 58 KK sehingga total keseluruhan Rumah Tangga Miskin di kelurahan kotalama adalah 1.204 KK.

Menurut Ibu Isprapti salah satu pegawai di Kelurahan Kotalama saat diwawancarai oleh peneliti mengenai kondisi kemiskinan di Kelurahan Kotalama mengatakan bahwa :

“ Di Kelurahan Kotalama ini penduduknya padat dengan kondisi ekonomi sangat miskin, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat pendapatan dari penduduk Kotalama yang tidak menentu karena mayoritas penduduk kotalama hanya bekerja

sebagai pedagang, Tukang becak, bahkan ada juga yang bekerja sebagai pemulung oleh sebab itu yang menyebabkan kondisi ekonomi di kelurahan Kotalama sangat miskin” (Wawancara 25 Juni 2008)

Kondisi kemiskinan di Kelurahan Kotalama juga dapat dilihat beberapa sektor antara lain sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Kondisi kesehatan di wilayah Kotalama pada umumnya masih *relative* rendah, sehingga masih banyak warga masyarakat yang perlu adanya perhatian terhadap kesehatan secara menyeluruh. Ini terbukti masih banyak kartu-kartu sehat (keluarga miskin) yang beredar di masyarakat, setiap hari tampak dipusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas dipenuhi warga untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik di puskesmas pusat maupun puskesmas pembantu. Dua buah puskesmas yang ada di kelurahan Kotalama merupakan tumpuan masyarakat sebagai deteksi dini terhadap masalah kesehatan terutama bagi keluarga miskin. Namun sarana dan prasarana yang ada perlu dilengkapi, sehingga memadai untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya pada sektor pendidikan Rata-rata taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kotalama masih menengah ke bawah atau SD sampai SLTA, Sementara lulusan pendidikan atau sarjana relatif sedikit, bahkan tidak sedikit anak putus sekolah karena kondisi kemampuan orang tua yang menyekolahkan anak sangat terbatas. Hal ini perlu penanganan secara serius agar utamanya anak yang putus sekolah dapat lagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau minimal bisa tamat sampai program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Untuk menangani hal tersebut perlu dioptimalkannya program anak asuh sehingga menyentuh masyarakat bawah, terutama masyarakat miskin.

Sedangkan pada sektor Ekonomi Kelurahan Kotalama sangat rendah sekali hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Kelurahan Kotalama yang tidak menentu seperti tukang becak, pemulung, pedagang dan yang mempunyai mata pencaharian tetap sangat sedikit sekali seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI serta Pensiunan TNI/ PNS bahkan masih banyak pengangguran, terutama bagi tamatan SLTA yang tidak bisa

melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sehingga perlu adanya pemikiran untuk peningkatan taraf hidup mereka dengan bantuan modal dan bimbingan pelatihan ketrampilan, terutama bagi usia angkatan kerja.

2. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Kotalama

BKM merupakan lembaga masyarakat yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat yang diakui baik oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya sendiri terutama masalah kemiskinan.

BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang didirikan berdasarkan Akta Notaris Subandi, SH. Sp N tanggal 12 April 2000 di Kelurahan Kotalama. Adapun Azas, prinsip, maksud, tujuan, serta tugas dari BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama yaitu :

1. Asas BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sejahtera Kelurahan Kotalama beraskan Pancasila dengan menjunjung tinggi keadilan, Kemitraan, dan kebersahaan.
2. Prinsip BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
BKM Sejahtera bekerja berdasarkan prinsip
 - a. Demokrasi :
Segala pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan orang lain harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak menemukan jalan keluar, maka pengambilan keputusan diambil secara voting.
 - b. Transparansi (keterbukaan) :
Usulan yang diajukan oleh KSM, dan akan didanai oleh P2KP melalui lembaga BKM Sejahtera kelurahan Kotalama termasuk pengelolaan keuangannya, harus dapat terbuka untuk masyarakat umum atau seluruh warga.
 - c. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) :
Pengelolaan keuangan termasuk reputasi pengelolaannya harus dapat dipercaya, dapat dimonitor dan dievaluasi secara mudah dan

langsung oleh seluruh warga. Secara pengeluaran harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif maupun kemanfaatannya.

d. Partisipasi (keikutsertaan) :

Program harus dilaksanakan secara partisipatif, mengacu pada inisiatif dari bawah dan mampu membangkitkan peran aktif seluruh warga, baik yang kaya maupun yang miskin dengan cara membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

e. Desentralisasi :

Segala bentuk keputusan harus diambil oleh lembaga yang dekat dengan KSM.

3. Sifat BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sejahtera Kelurahan Kotalama bersifat Independen

4. Tujuan BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

- a. Mewadai Kegiatan warga kelurahan Kotalama
- b. Menghidupkan semangat musyawarah warga Kelurahan Kotalama
- c. Menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan sesama warga Kelurahan Kotalama
- d. Meningkatkan sumberdaya masyarakat Kelurahan Kotalama untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi secara mandiri.

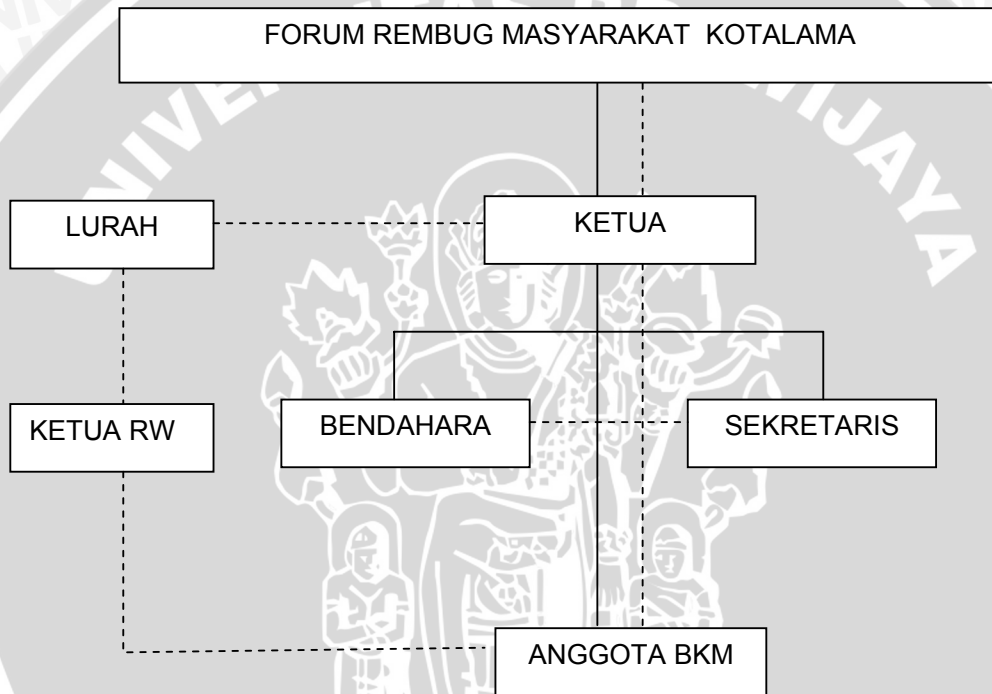
5. Tugas BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

Tugas BKM Kotalama adalah melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan P2KP yang meliputi:

- a. Menginventarisir usulan kegiatan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik dari LSM usaha Ekonomi Produktif/KSM pembangunan sarana dan Prasarana fisik dan KSM Pelatihan.
- b. Melakukan Koordinasi dan Pemantauan kegiatan dalam Pembangunan Lingkungan dan Pengembangan usaha KSM
- c. Menyusun dan Menetapkan kegiatan-kegiatan KSM untuk dijadikan usulan kerja BKM
- d. Mengkaji dan Menyetujui Permintaan Pencairan Dana Bantuan

- e. Mengelola dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai Unsur Pengelola Keuangan
 - f. Membuat laporan bulanan.
6. Struktur Organisasi BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

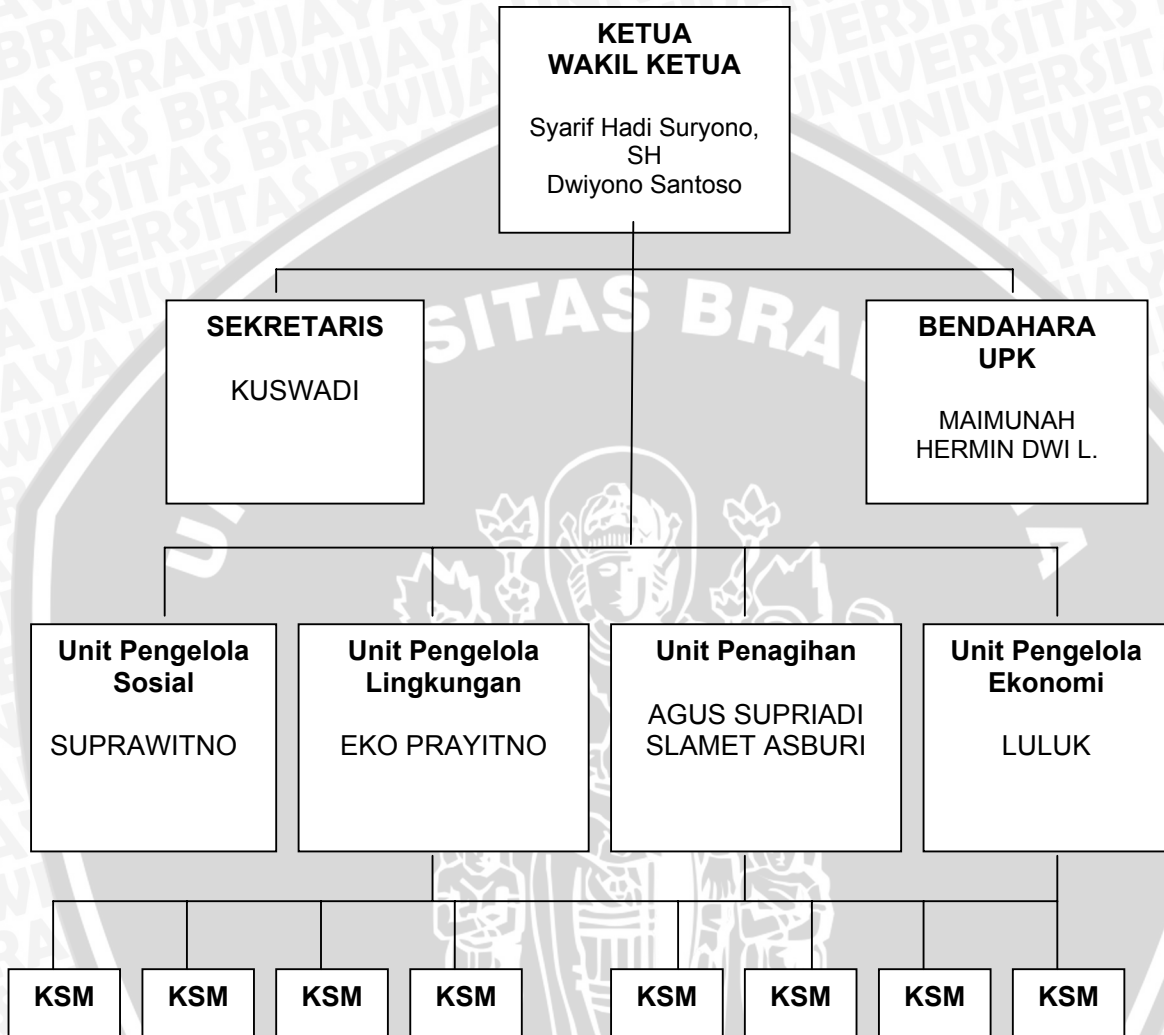
**STRUKTUR ORGANISASI
BKM SEJAHTERA
KELURAHAN KOTALAMA**



Keterangan : ——— Garis Instruksi
 - - - - - Garis Koordinatif

Sumber: BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BKM SEJAHTERA
KELURAHAN KOTALAMA**



Sumber: BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama

Keterangan: KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang sebagai penerima dana bergulir yang berasal dari BKM dan dikoordinasi oleh satu orang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

7. Sistem Pemilihan Pengurus BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama:
 - a. Anggota BKM Sejahtera dipilih oleh sidang rembug desa melalui pemungutan suara (voting)
 - b. Pengurus BKM dicalonkan oleh setiap RT/RW masing-masing 1 calon dari beberapa calon yang mengikuti sidang masyarakat.
 - c. Pengurus dipilih dari dan oleh Peserta sidang Maskot yang selanjutnya akan diatur dalam Tata tertib pemilihan.
8. Pembagian peran dan wewenang pengurus BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama :
 - 1) Koordinator/Ketua
 - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama,
 - b) Mewakili kegiatan BKM Sejahtera untuk kegiatan – kegiatan keluar kelurahan Kotalama,
 - c) Memimpin rapat lengkap BKM Sejahtera,
 - d) Bertanggungjawab pada personalia pengurus dan anggota BKM Sejahtera.
 - e) Sendiri dan atau bersama sekretaris BKM Sejahtera, menandatangani surat-surat dan atau surat perjanjian,
 - f) Bertanggung jawab pada pola pengawasan intern organisasi.
 - 2) Sekretaris
 - a) Menyelesaikan tugas - tugas kesekretariatan
 - b) Melakukan pencatatan (notulen) setiap melaksanakan rapat BKM Sejahtera
 - c) Melakukan dokumentasi kegiatan.
 - d) Memimpin rapat lengkap BKM Sejahtera apabila koordinator berhalangan hadir.
 - 3) Bendahara
 - a) Menyusun kebutuhan anggaran operasional BKM dan UPK untuk dibahas dalam rapat lengkap pengurus BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
 - b) Mengelola penerimaan dan penggunaan biaya-biaya:

- (a). Biaya Operasional Kegiatan (BOP) BKM Sejahtera
 - (b). Dana Hibah Fisik dan Sosial
 - (c). Dana Pemupukan Modal
- 4) Manager UPK
 - a) Mencatat secara tertib dan lengkap penyaluran dan pencairan dana kepada KSM.
 - b) Mengelola dana bergulir BKM Sejahtera pada penerima manfaat, baik KSM perguliran maupun Dana Bergulir lainnya.
 - c) Membuat laporan keuangan BKM secara rutin setiap bulan sekali.
 - d) Membuat laporan akhir keuangan BKM Sejahtera sesuai dengan prinsip akuntansi.
 - 5) Kasir UPK
 - a) Membantu tugas - tugas manager UPK
 - b) Mewakili manager UPK dalam rapat lengkap anggota BKM Sejahtera apabila manager UPK berhalangan hadir.
 - c) Menerima angsuran pinjaman dari KSM.
 - d) Membuat jurnal harian, mingguan dan bulanan.
 - e) Melakukan penyetoran dana ke rekening perguliran.
 - f) Menyiapkan bahan laporan keuangan UPK perguliran
 - g) Melaporkan sirkulasi keuangan UPK kepada manager UPK dan pengurus BKM Sejahtera secara rutin setiap akhir bulan.
 - h) Mengisi buku – buku bantu
 - i) Mencatat setiap transaksi ke dalam bukti transaksi dan buku bantu
 - j) Membantu mempersiapkan laporan keuangan UPK dan BKM Sejahtera secara rutin.

- 6) Administrasi KSM (UPS – UPL)
 - a) Mencatat dan melakukan rekap dengan tertib proposal yang masuk.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang masuk.
 - c) Mengagendakan dan mengkoordinasikan kegiatan survey ke lokasi KSM/pengusul.
 - d) Melakukan rekap terhadap hasil survey dan membuat draft daftar proposal yang layak.
 - e) Menerima angsuran dari KSM dan membukukan pada buku bantu angsuran
 - f) Membantu Kasir dan Manager UPK pada proses perguliran dana pada KSM perguliran dan Dana Bergulir lainnya
 - g) Mencatat dan memelihara administrasi KSM dan proses dana bergulir lainnya
- 7) Juru Tagih
 - a) Menerima semua proposal yang masuk dari KSM,
 - b) Mengoreksi kelengkapan proposal yang masuk, sesuai dengan ketentuan proposal dari BKM,
 - c) Melakukan survey awal proposal KSM/Kredit mikro,
 - d) Memfasilitasi proses pelunasan tunggakan kredit di masing-masing KSM,
 - e) Mengirim surat tagihan sebelum tgl 10 setiap bulan, untuk mengingatkan KSM
 - f) Mendatangi KSM yang terlambat mengangsur, yang dibuktikan dengan buku ekspedisi (sebagai lapaoran kegiatan penagihan).

Dari pemaparan diatas komposisi tersebut sedapat mungkin memenuhi ketentuan prinsip dan azas dalam P2KP seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Dwiyono Santoso, selaku Wakil Ketua BKM Sejahtera. Beliau mengungkapkan bahwa:

“.....pemilihan anggota BKM Sejahtera dipilih oleh sidang rembug desa melalui pemungutan suara, pengurus BKM ini dicalonkan oleh setiap RT/RW masing-masing 1 calon dari beberapa calon yang mengikuti sidang dan Pengurus BKM ini dipilih oleh peserta sidang MASKOT yang selanjutnya akan diatur dalam tata tertib pemilihan, agar dapat menghasilkan anggota BKM yang benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga BKM akan lebih mengakar dan representatif....”
(Wawancara 15 Juni 2008)

Dan diungkapkan oleh Bapak Syarif, SH selaku koordinator BKM Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa:

“....BKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat di Kelurahan Kotalama...”(Wawancara 17 Juni 2008)

Pemilihan anggota BKM dilaksanakan berdasarkan azas kewilayahan dimana tiap RW memilih beberapa calon anggota BKM untuk diajukan pada musyawarah atau bisa disebut dengan sidang MASKOT yang selanjutnya dipilih oleh para peserta sidang setelah itu akan diatur dalam tata tertib pemilihan. Anggota BKM ini umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah pengembangan masyarakat Kelurahan Kotalama hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyumbatan aspirasi masyarakat dan dapat menghasilkan anggota BKM yang benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga BKM akan lebih mengakar dan representatif, karena BKM disini juga sebagai jembatan bagi masyarakat untuk membangun solidaritas dan kesatuan sosial berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan Kemasyarakatan menuju kemajuan bersama, selain itu BKM Sejahtera bertanggungjawab atas keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat di Kelurahan Kotalama.

9 Pemberdayaan Di Kelurahan Kotalama

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap agar hasilnya optimal. Proses pemberdayaan masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mengusahakan agar masyarakat miskin/tidak berdaya bertransformasi menjadi masyarakat yang berdaya, P2KP mengusahakan masyarakat untuk bertransformasi menjadi masyarakat mandiri dengan tujuan akhir yaitu proses mentransformasikan masyarakat mandiri menuju masyarakat madani. Proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi di kelurahan Kotalama dapat dilihat dari proses transformasi dari kondisi masyarakat miskin menuju masyarakat berdaya yang dilalui berdasarkan beberapa tahap. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan P2KP yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kotalama.

Tahap pertama dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui P2KP adalah persiapan masyarakat melalui faskel. Dalam tahap ini merupakan hal yang terpenting yang perlu dilakukan karena kegiatan ini merupakan pondasi awal dalam membuat masyarakat miskin menjadi lebih berdaya. Di kelurahan Kotalama masuknya P2KP diawali dengan difasilitasi oleh faskel sekitar tahun 2000. dalam tahap ini masyarakat belajar untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku serta cara pandang sehingga hasil yang diharapkan dari proses belajar ini adalah peneladanan prinsip dan nilai luhur kemanusiaan.

Pada tahap yang kedua masyarakat diharapkan mampu bersinergi dengan masyarakat yang lain. Hasil yang didapat dalam tahap ini adalah terbentuknya lembaga independen yang representative dan mengakar, yaitu dengan terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk melalui musyawarah, beranggotakan masyarakat, diurus oleh masyarakat, diurus oleh masyarakat, dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Selain pembentukan BKM, pemberdayaan dalam tahap ini juga ditandai dengan bermunculannya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di wilayah Kelurahan Kotalama.

Pada tahap ketiga masyarakat belajar untuk membuat program kegiatan dengan harapan konsep tridaya P2KP (Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan social, pemberdayaan lingkungan) dapat tercermin dalam pelaksanaan P2KP

di Kelurahan Kotalama. Dalam tahap ini, proses pemberdayaan sejati sangat ditonjolkan, masyarakat dituntut untuk belajar membuat program kegiatan yang disebut Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis).

PJM Pronangkis ini berisi seluruh rencana masyarakat kelurahan yang nantinya akan didanai oleh P2KP. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga, pelatihan ketrampilan, dan sebagainya. PJM Pronangkis ini dibuat oleh pengurus BKM didampingi oleh faskel dengan fasilitasi dari pihak pemerintah kelurahan. Setelah membuat PJM Pronangkis, masyarakat diharapkan pada tahap pemanfaatan BLM kebutuhan masyarakat miskin yang telah tertuang dalam PJM Pronangkis dapat terealisasi, dengan begitu masyarakat dapat merasakan manfaat dari P2KP.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Kelurahan Kotalama saat ini adalah pemanfaatan dana bergulir untuk usaha dan penguatan usaha. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat kotalama adalah pengurangan kemiskinan di kelurahan Kotalama. Masalah kemiskinan tidak hanya dapat dipandang dari sisi ekonomi belaka namun juga harus dipahami sebagai masalah secara total, maksudnya kemiskinan yang ada ini dapat dilihat dari sisi ekonomi, social, dan politik. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai adanya kekurangan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok orang, misalnya adalah pendapatan. Kemiskinan secara social yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Kemiskinan politik lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan. Sesuai dengan konsep tridaya P2KP yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan pemberdayaan ekonomi, kemiskinan social diatasi dengan pemberdayaan lingkungan dan kemiskinan politik diatasi dengan pemberdayaan social.

Hasilnya P2KP di Kelurahan kotalama pada tahun 2000 diharapkan mampu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di kelurahan Kotalama. Hal ini terlihat ketika P2KP mulai masuk, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengurus pelaksanaan P2KP dengan duduk menjadi pengurus di BKM,

masyarakat miskin juga dituntut untuk membuat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan masyarakat juga diikutsertakan dalam rembuk warga untuk menentukan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang terangkum dalam PJM Pronangkis. Masyarakat diberikan daya dan kekuasaan serta kebebasan berpendapat untuk menentukan kemajuan lingkungannya. Dengan begitu masyarakat diberdayakan dalam hal politik, sehingga paling tidak perlahan-lahan kemiskinan politik dapat ditanggulangi.

Kemiskinan social yang ada diperkecil melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang memudahkan akses dan kepentingan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan pembangunan jalan, perumahan, gorong-gorong, dan lain-lain. Kemiskinan ekonomi dalam P2KP diatasi melalui pola pemberdayaan ekonomi dengan peningkatan usaha ekonomi produktif melalui dana pinjaman bergulir, dengan harapan masyarakat dapat menanggulangi kemiskinannya secara mandiri.

Namun dalam pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir di kelurahan Kotalama menemui masalah yaitu terjadinya penunggakan-penunggakan cicilan oleh para KSM untuk mengatasi hal itu pihak BKM meminta kepada para ketua KSM untuk menagih para anggotanya yang nunggak dalam membayar cicilan.

3. Gambaran Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di BKM Kotalama

Salah satu kelurahan yang menerima dana bantuan P2KP di Kota Malang adalah Kelurahan Kotalama. Salah satu problema sosial utama bagi masyarakat Kotalama adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh Sumber Daya Manusia yang rendah serta pola pikir yang sulit diajak maju yang menyebabkan seseorang/warga hidup tanpa harapan dalam ketidakberdayaan. Hal ini senada dengan Pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Isprapti yang merupakan salah satu Pegawai di Kelurahan Kotalama adalah, sebagai berikut:

“...penyebab kemiskinan di Kotalama disebabkan oleh pola pikir dan pendidikan yang rendah, oleh karena itu cara untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya berbentuk bantuan dana atau materi melainkan harus menekankan pemberdayaan warga. Persoalan ini penting untuk

diselesaikan karena kalau tidak, dampaknya akan menimbulkan tindak kejahatan dan kerawanan sosial lainnya, terutama untuk wilayah Kotalama yang padat penduduk.... "(Wawancara 18 Juni 2008)

Dari latar belakang tersebut maka pemerintah menggalakkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP, dimana dalam program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian fasilitas kegiatan, melembagakan forum musyawarah, menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan warga masyarakat, serta peningkatan potensi sumberdaya masyarakat.

Konsep pemberdayaan yang digagas P2KP bukanlah sekedar konsepsi atau teori saja. Namun, benar-benar diwujudkan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Di setiap kelurahan diluncurkannya P2KP dibentuk lembaga-lembaga yang mengurus warga miskin. Lembaga ini dibentuk masyarakat sendiri, secara demokratis. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, tidak mencampuri sedikitpun proses pembentukannya.

Sebelum pembentukan lembaga-lembaga itu, Pemerintah dalam hal ini TKPP (terdiri dari beberapa satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah) melakukan sosialisasi, untuk membantu masyarakat memahami P2KP secara tuntas. Selain itu, TKPP bermitra dengan sebuah perusahaan penyedia konsultan dan beberapa orang Faskel (fasilitator kelurahan), yang ditugasi melakukan pendampingan langsung terhadap kelompok masyarakat miskin di Kelurahan seorang Faskel menangani dua Kelurahan.

Lembaga yang pertama kali dibentuk adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok ini berada di wilayah RT, yang secara obyektif menetapkan jumlah warga layak mendapatkan bantuan, sekaligus menjadi anggotanya. KSM-KSM itu selanjutnya membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), lembaga yang menangani langsung Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) di kelurahan. Keanggotaan BKM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, ada ustadz, guru, dan mereka yang dipercaya masyarakat.

Setelah terbentuk dan menerima data dari KSM, tentang jumlah warga miskin, beserta berbagai kebutuhannya, BKM menyusun PJM (Program Jangka Menengah) Pronangkis, untuk kurun waktu 3-5 tahun. PJM itu merupakan daftar kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, untuk membantu kinerja BKM dalam pengelolaan keuangan dan dana BLM (Bantuan Langsung kepada Masyarakat) dari P2KP, BKM membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan), sebagai unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

UPK mempunyai tugas memegang rekening BKM, yang setiap saat dapat mengajukan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ke Bank yang ditunjuk P2KP. Ini bukti Pemerintah tidak pegang dana bantuan atau uang rakyat. Rekening BLM tidak masuk rekening Pemerintah, tetapi masuk rekening masyarakat (rekening bersama) via BKM. Masyarakat disilahkan mengembangkan sendiri dana yang diterima sesuai aturan. Di sinilah wujud upaya P2KP memproses kemandirian masyarakat.

P2KP memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program penanggulangan kemiskinan yang terdahulu, seperti KIP (Kampung Improvement Program), VIP (Village Improvement Project) dan P2BK (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Keluarga) juga mengahadopsi dari pengalaman penyelenggaraan program IDT (Inpres Desa Tertinggal)

P2KP diharapkan mampu bertahan dan berhasil dalam program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan oleh karena itu mencoba strategi-strategi seperti yang tercantum dalam buku pedoman umum P2KP adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan konsep Tribina yaitu terdiri dari: Bina sosial, Bina ekonomi, dan Bina lingkungan.
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan Pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membuka usaha.

4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Kegiatan ini tidak hanya bersifat sukarela terhadap keadaan kemiskinan yang dialami sekarang, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini P2KP disiapkan landasan berupa institusi, masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat dimasa yang akan datang.

Kebijakan yang diyakini oleh P2KP adalah memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dana bantuan P2KP merupakan dana Hibah maupun pinjaman yang disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja, sepengetahuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ditunjuk warga masyarakat melalui lembaga bentukan masyarakat juga.

Sedangkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan memperoleh dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, namun masyarakat harus menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawabnya untuk dapat melakukan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Dana hibah ini diprioritaskan kepada jenis-jenis prasarana dan sarana yang dapat tampak langsung kepada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dimaksudkan dapat berupa pembangunan baru dan perbaikan yang lama. Pengelolaan seluruh kegiatan, baik pengembangan usaha maupun pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan yang semuanya dilakukan dengan memakai pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut partisipasi masyarakat secara aktif. Pelaksanaan kegiatan ini sedapat mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaan (buku pedoman P2KP).

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Kotalama ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2000 melalui Rembug Masyarakat Kelurahan Kotalama. Rembug Masyarakat adalah Forum Kedaulatan Tertinggi di Tingkat Kelurahan. Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Sosial yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Buku Pedoman Umum Dan Teknis P2KP.

Pada Rembug Masyarakat tanggal 23 Februari 2000 tersebut diadakan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pembuatan asas, dasar, sifat, maksud, dan tujuan, membuat struktur anggota, memilih Pengurus/Anggota BKM untuk masa bakti 4 tahun dan juga menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM, yang kemudian dikuatkan dalam akta notaris Subandi, SH. Sp N tanggal 12 April 2000.

Tujuan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama adalah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan seluruh warga masyarakat kelurahan. Sedangkan, sasaran yang ingin dicapai dari program P2KP di Kelurahan Kotalama adalah segala bentuk bantuan yang disediakan oleh P2KP hanya ditujukan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kelurahan Kotalama dan penerima bantuan P2KP hanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terbentuk dari sekumpulan orang per orang yang berasal dari keluarga miskin guna secara bersama mengikatkan diri untuk menerima, mengelola, bertanggung jawab terhadap bantuan dana yang telah diterimanya.

Sesuai ketentuan P2KP, wilayah Kelurahan Kotalama telah memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar Rp 1.217.260.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu). Dana tersebut digunakan untuk :

- a. Piutang KSM (gotong royong) : Rp 852.286.000
- b. Piutang KMA (Mandiri) : Rp 82.626.000
- c. Piutang Usaha BKM (TIM) : Rp 75.000.000
- d. Piutang Pengurus dan Pegawai : Rp 60.835.000
- e. Uang Tunai : Rp 34.952.000
- f. Uang di Bank Mandiri : Rp 111.561.000

Dengan adanya P2KP ini di Kelurahan Kotalama telah dapat membantu menguatkan dalam perekonomian masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Kotalama dengan memanfaatkan bantuan pinjaman dana bergulir yang diberikan untuk keluarga miskin sebagai modal bagi peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Kebanyakan warga Kelurahan Kotalama yang memanfaatkan dana P2KP memiliki usaha pedagang, perancangan, warung makan dsb, pada warga yang menginginkan meminjam dana P2KP diwajibkan memenuhi kriteria yang sudah disediakan dalam formulir serta membuat proposal per satu KSM. Persyaratan khusus yang perlu disiapkan untuk mendaftar sebagai anggota KSM yaitu menunjukkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagai warga asli Kelurahan Kotalama, dan keterangan tidak mampu dari RT dan RW. Dalam programnya P2KP menjangkau pula pada permasalahan sosial dan budaya yang ada di Kelurahan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya program P2KP disertai dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan Monitoring
2. Survey dan
3. Studi kelayakan

4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

a. Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam proses penyaluran dana bantuan P2KP

P2KP adalah program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar nantinya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. Untuk mewujudkan tujuan secara maksimal, diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah pemerintah, masyarakat, swasta serta kelompok peduli setempat. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik dalam memampukan kemandirian masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dengan menempatkan

masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan.

Untuk mencapai maksud di atas, diperlukan partisipasi serta peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan P2KP untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tujuan pelibatan pemerintah dalam pelaksanaan P2KP antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Menyukseskan pelaksanaan P2KP, yang merupakan program pemerintah, melalui pendekatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan komunitas.
- b) Memberikan legitimasi kepada para pelaku, antara lain : konsultan, fasilitator, kelurahan, KSM, Kelompok sosial lainnya, dan warga masyarakat penerima bantuan.
- c) Menjadi *wasit* bila timbul persoalan-persoalan yang memerlukan fungsi "penengah"
- d) Mendorong dan memampukan para pelaku agar peran dan tugas-tugasnya dapat dilaksanakan secara efektif.
- e) Turut memberikan masukan dan mengendalikan, khususnya pembangunan fisik, agar terintegrasi dengan rencana-rencana dan program pembangunan lainnya yang ada di daerah. (sumber: Pedoman umum P2KP)

Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Kementerian Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, sejak tahun 2000, menggulirkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) kepada masyarakat miskin di perkotaan yang mempunyai usaha produktif, diberikan bantuan pembiayaan berupa dana bergulir, sekaligus diberikan pendampingan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan usahanya. Apabila dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan usaha mikro tersebut, tetapi juga mampu mengembalikan pinjaman itu sehingga bisa digulirkan atau dipinjamkan kembali kepada usaha ekonomi produktif atau kaum miskin lain yang membutuhkan.

1) Pemerintah daerah yang terlibat sebagai fasilitator dalam Proses penyaluran dana bantuan P2KP

Pelaksanaan P2KP di Kota Malang ditunjang sepenuhnya oleh peran dari Pemerintah Daerah Kota Malang Pada hakekatnya Pemerintah Daerah yang terlibat sebagai fasilitator adalah untuk memberikan pendampingan atau upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan P2KP agar mencapai keberhasilan salah satunya memfasilitasi proses penyaluran dana bantuan P2KP. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengikuti dinamika perkembangan P2KP di wilayahnya, serta dalam merespon berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi di Kota Malang. Peranan Pemerintah Daerah Kota Malang secara optimal sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan P2KP. Peran Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai fasilitator dapat dilihat pada tataran Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Endah, beliau mengungkapkan bahwa:

“.....Peran Pemerintah daerah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja mbak, seperti terbentuknya Tim Korkot di tingkat Kota, PJOK di Tingkat Kecamatan, dan Faskel Di Tingkat Kelurahan, dan kami selaku pemerintah daerah hanya memonitoring segala kegiatan dan bersedia membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini, mbak....”(Wawancara 25 Juli 2008)

a. Di Tingkat Kota/Kab

Pada tingkat kota wujud nyatanya adalah terbentuknya Tim Koordinasi Kota (Tim Korkot) melalui Surat Keputusan Walikota. Tim Koordinasi P2KP Kota terdiri dari Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota sebagai pengarah, Bappeko sebagai ketua, Dinas yang menangani perumahan atau permukiman sebagai wakil ketua, dan beranggotakan dinas-dinas terkait lainnya. Dalam Pelaksanaan Proses penyaluran dana bantuan P2KP Tim Koordinasi Kota mempunyai peran pokok antara lain: memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.

Tugas Utama tim itu adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - b. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut ke secretariat P2KP pusat, dengan tembusan ke Bappeda Tingkat I
 - c. Melakukan pemasyarakatan program kepada aparat di kecamatan
 - d. Membantu pelaksanaan P2KP pada pada wilayah kecamatan, bila diperlukan.
 - e. Membantu merealisasikan Forum Konsultan penanggulangan Kemiskinan Kota
 - f. Melakukan Monitoring kegiatan pelaksanaan Program dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan. (sumber: pedoman umum P2KP)
- b. Di Tingkat Kecamatan
- Unsur pemerintah di tingkat kecamatan terdiri dari camat dan aparatnya. Peran pokok aparat kecamatan adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, sedangkan tugas utamanya adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - b. Melakukan Pemasyarakatan program kepada kelurahan-kelurahan di wilayah kerjanya.
 - c. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada wilayah kelurahan memerlukan koordinasi
 - d. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan dan atau fasilitator kelurahan
 - e. Membantu memberikan masukan kepada KMW dan fasilitator kelurahan mengenai penduduk dan kelurahan miskin, baik

berdasarkan criteria yang disusun sendiri, maupun berdasarkan arahan dari Pemerintah daerah Kota/Kab atau instansi terkait lainnya.

- f. Menyusun daftar lokasi kelurahan dalam kecamatan berdasarkan besarnya jumlah penduduk miskin dalam kelurahan dan menyampaikan kepada Pemerintah daerah Kota/Kab

Selain itu wujud nyatanya terbentuknya Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK). PJOK adalah penanggungjawab administrasi proyek yang diangkat dari aparat Pemerintah daerah Kota/Kab dan ditempatkan di kecamatan. Dalam pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan P2KP peran dari PJOK antara lain: memantau proses penentuan lokasi kelurahan prioritas, sesuai dengan petunjuk penentuan lokasi target P2KP yang dilakukan oleh aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat pemerintah Kota/Kab, membantu BKM dalam proses pembukuan rekening di BRI untuk penyaluran dana keperluan P2KP, mengelola dana administrasi proyek PJOK, bersama BKM dan KSM, atas rekomendasi KMW, menandatangani SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) untuk pencairan dana. (sumber: pedoman umum P2KP)

- c. Di Tingkat Kelurahan

Tingkat Kelurahan, setidaknya terdapat dua unsur sebagai berikut: Unsur pemerintah tingkat kelurahan (lurah dan aparatnya) dan BKM. Unsur pemerintah tingkat kelurahan, yaitu lurah dan aparatnya. Peran pokok mereka adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, dengan tugas utama sebaga berikut:

1. memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
2. melakukan pemasyarakatan program kepada warga masyarakat di kelurahan, khususnya kepada kelompok-kelompok atau organisasi social dan kemasyarakatan yang ada.
3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama konsultan dan fasilitator kelurahan, serta membantu pelaksanaan peninjauan lapangan

4. Membantu menyusun kriteria kemiskinan untuk penetapan calon penerima bantuan P2KP. Kriteria ini dapat dibuat berdasarkan ketentuan dari pemerintah daerah provinsi dan pemda kota/kab, berdasarkan pembahasan bersama KMW/fasilitator kelurahan, atau pembahasan bersama warga masyarakat di kelurahan.
5. Mengusulkan kepada KMW/Fasilitator kelurahan daftar keluarga-keluarga miskin dalam satu kelurahan untuk mendapat bantuan P2KP
6. Membantu terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/fasilitator kelurahan dalam rangka penyebarluasan informasi P2KP
7. Membantu pembentukan BKM serta kegiatan-kegiatannya.
8. Mendukung dan menghadiri pertemuan-pertemuan antara KSM, BKM, KMW, dan fasilitator kelurahan dalam tahap perencanaan, seleksi, dan Penetapan usulan program-program kegiatan
9. Mendukung usulan-usulan kegiatan KSM yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BKM berdasarkan pertimbangan KMW
10. Lurah, atau yang mewakili, bersama PJOK menandatangani usulan BKM dan SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) dalam kapasitas *mengetahui*.

Dalam pelaksanaan pendampingan di tingkat kelurahan dengan terbentuknya Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel). Faskel merupakan tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP di lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dalam menyiapkan usulan-usulan, yang didahului dengan pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi. Faskel merupakan salah satu pihak yang berperan dalam mensosialisasikan informasi tentang P2KP, faskel juga bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam memfasilitasi pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan mendorong keluarga miskin untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (sumber: pedoman umum P2KP)

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Dwiyono Santoso, beliau mengungkapkan bahwa :

“...Faskel disini sebagai pelaksana proyek termasuk dalam mensosialisasikan masyarakat tentang P2KP, selain itu mencatat semua perkembangan yang terjadi dan melaporkannya kepada KMW, serta membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan....”(Wawancara 26 Juli 2008)

Dan diungkapkan oleh Saudari Hermin, selaku salah satu anggota BKM Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa:

“...faskel ditunjuk langsung oleh KMW dan disetujui oleh Pemda Karena faskel sangat berperan penting dalam pelaksanaan P2KP ini mulai dari tahap sosialisasi, Implementasi, evaluasi, hingga monitoring proyek...”(Wawancara 26 Juli 2008)

Peran Faskel dalam proses penyaluran dana bantuan P2KP adalah sebagai berikut 1) Membantu KSM menyiapkan usulan kegiatan serta mendampingi selama kegiatan berlangsung, 2) Membantu BKM dalam menyeleksi usulan KSM yang masuk, 3) Membantu memfungsikan Unit Pengelola Keuangan (UPK), 4) Membantu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan (Sumber: Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi BAPPEKO Malang)

2) Proses Penyaluran dana Bantuan P2KP

Penyaluran dana merupakan proses dan prosedur administrasi penyaluran dana yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, sejak dari pusat, daerah kelurahan hingga KSM selaku sasaran utama P2KP. Penyaluran di tingkat pusat adalah penyaluran dana dari pemerintah dan lembaga donor yang ditranfer dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ke Rekening BKM yang berada di Bank Pemerintah yang dipilih oleh BKM. Selanjutnya, dari BKM dana tersebut diteruskan kepada KSM dan digulirkan secara terus menerus. Hal ini senada dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Koordinator BKM Sejahtera Bapak Syarif hadi Suryono, SH. Beliau mengungkapkan bahwa:

“ dana BLM hanya dapat disalurkan apabila KSM atau masyarakat telah dapat menunjukkan kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan

kemiskinan secara mandiri hal itu menjadi syarat utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana BLM dari BKM ke KSM dan masyarakat. Maka dari itu, upaya untuk dapat menerima dana BLM yang dikelola oleh UPK/BKM, dapat dilakukan dengan mengajukan usulan kegiatan dan usulan mereka telah dinilai layak oleh UPK serta disetujui prioritas pendanaannya oleh BKM....” (Wawancara 26 Juli 2008)

Apabila usulan kegiatan KSM telah disetujui oleh KMW dan telah ditetapkan prioritasnya oleh BKM, BKM dapat mengajukan pencairan dana kepada PJOK. Setelah Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara PJOK dari BKM ditandatangani, maka dana P2KP tersebut dapat ditransfer ke rekening BKM.

Penarikan dana dari Bank oleh BKM harus dilakukan oleh unsur BKM yaitu Koordinator dan Bendahara UPK-BKM. Kemudian sejumlah 2% dari dana yang cair tersebut diberikan kepada fasilitator sebagai intensif dan 1,5% lagi menjadi hak BKM biaya pelaksanaan kegiatannya.

Sebelum dilakukan penyaluran dana BKM kepada KSM, anggota BKM melakukan survey kepada tiap-tiap KSM untuk mengetahui kebenaran dan keseriusan usulan mereka serta kesungguhan mereka sebagai pemimjam dana P2KP. Dari hasil survey ini dapat diketahui keseriusan usaha di lapangan dengan yang tercantum dalam proposal. Sehingga baik BKM maupun KSM dapat meminimalisir persoalan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Hal ini senada dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Saudari Hermin selaku UPK di BKM Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa:

“.....survey ini dilakukan dengan tujuan dalam penyaluran dana bantuan P2KP ini dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat yang banyak menuntut tanpa diimbangi dengan kemampuan yang memadai.....”(Wawancara 26 Juli 2008)

Penyaluran dana dari BKM kepada KSM dilakukan melalui perjanjian yang antara lain berisi tentang kesanggupan KSM untuk mengangsur setiap bulannya sesuai ketentuan. Kesanggupan untuk memeberikan jaminan kepada BKM. Kesediaan untuk memperoleh potongan sejumlah 2% dari kredit yang diperoleh untuk biaya administrasi dan asuransi jiwa kumpulan. Apabila

KSM tidak memiliki jaminan yang memadai, maka kepala kelurahan dapat memberikan keterangan atau jaminan secara tertulis bahwa KSM yang bersangkutan adalah warga kelurahan setempat dan akan bersedia memenuhi kewajibannya.

Agar proyek ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengurangi kemiskinan khususnya di Kota Malang, maka pola pembiayaan dilakukan melalui pendekatan kelompok. Dalam hal ini para pelaku usaha kecil yang merupakan kaum miskin, dihimpun dalam kelompok yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Setiap KSM beranggotakan antara 5-15 orang, lengkap dengan kepengurusan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya kelompok ini diharapkan akan mampu meningkatkan jaringan para pelaku usaha kecil dan rakyat miskin ini terhadap dana pinjaman dari BKM

Hal ini senada seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Koordinator BKM yaitu Bapak Syarif. SH, beliau mengungkapkan bahwa :

“.....Proyek P2KP ini dilakukan dengan pendekatan Kelompok, maksudnya para pelaku usaha terkumpul dalam kelompok yang disebut KSM/KMA dimana di BKM Sejahtera ini sudah tercatat 562 KSM dan 277 KMA....”(Wawancara 14 Mei 2008)

Dengan adanya kelompok ini diharapkan akan mampu meningkatkan akses usaha ekonomi produktif dan rakyat miskin ini terhadap pembiayaan dari BKM. Hal tersebut dimungkinkan karena:

1. Usaha ekonomi produktif bisa mengajukan pembiayaan secara kolektif yang dikoordinir oleh pengurus KSM. Dengan pembiayaan secara kolektif ini, diharapkan akan lebih efisien, karena BKM tidak perlu mendatangi rakyat miskin satu persatu, tetapi cukup melalui KSM.

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Syarif, SH. Beliau mengungkapkan:

“...para pelaku usaha yang tergabung dalam KSM di kelurahan Kotalama ini mengajukan pinjaman secara kolektif, sehingga pihak BKM tidak perlu mendatangi satu-persatu tapi cukup melalui KSM, jadi pada saat jatuh tempo juru tagih kita (BKM) hanya datang kepada ketua KSM dan tidak perlu mendatangi anggota KSM satu persatu kan sudah menjadi tanggungjawab ketua KSM nya...”(Wawancara 19 Juli 2008)

Adapun tanggapan lain yang diungkapkan oleh Saudari Maimunah selaku bendahara UPK di BKM Sejahtera, beliau mengungkapkan:

"...Biasanya sebelum ditagih para ketua KSM sudah datang ke kantor,mbak. Untuk membayar angsuran pinjaman, jadi kita tidak perlu kerumahnya tapi ada juga yang harus tiap hari ditagih ke ketua KSM nya biasanya yang usahanya macet jadi nggak bisa bayar tepat waktu..."(Wawancara 18 Juli 2008)

2. KSM juga dapat berperan membantu BKM dalam melakukan seleksi awal terhadap calon nasabah usaha kecil karena:
 - a. Usaha kecil yang menjadi anggota KSM terlebih dahulu akan diseleksi melalui persyaratan yang telah ditetapkan serta direkomendasikan dan disetujui oleh anggota KSM lainnya.
 - b. Pengajuan pembiayaan/kredit oleh seorang anggota harus mendapat persetujuan dari anggota KSM lainnya, baik mengenai jumlah maupun rencana penggunaannya.

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Syarif, SH. Beliau mengungkapkan bahwa:

"...ketua KSM berhak menyeleksi awal para anggota yang akan tergabung dalam KSM nya hal ini dilakukan karena apabila terjadi kemacetan akan menjadi tanggungjawab bersama oleh sebab itu pengajuan kredit oleh seorang anggota KSM harus mendapat persetujuan anggota KSM lainnya..."(Wawancara 19 Juli 2008)

Pernyataan lain yang diungkapkan oleh Siti Solicha selaku ketua KSM Brantas 76, beliau mengungkapkan bahwa:

"...kalau mau masuk menjadi anggota KSM saya, gampang kok mbak. pertama saya seleksi dulu usahanya apa, besar kreditnya berapa nanti saya musyawarahkan dulu dengan anggota-anggota saya dan misalnya semua setuju langsung bisa jadi anggota KSM Brantas 76 mbak..."(Wawancara 19 Juli 2008)

3. Dengan adanya KSM akan tercipta agunan alternatif berupa tanggung renteng, dimana setiap terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman, akan menjadi tanggung jawab anggota KSM lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh koordinator BKM Sejahtera yaitu Bapak Syarif adalah sebagai berikut:

“...Tanggung renteng disini maksudnya jika salah satu anggota KSM ada yang macet dalam pengembalian dana secara otomatis satu kelompok ini ya yang bertanggungjawab, misalnya dalam satu RT sebagai anggota KSM dan salah satunya ada yang macet ya satu RT itu bisa kena semua...” (Wawancara 25 Juni 2008)

Pernyataan lain yang diungkapkan oleh Ibu Siti Solicha, beliau mengungkapkan bahwa:

“... saya tau mbak tanggung renteng ini dimana setiap terjadi penunggakan cicilan menjadi tanggungjawab bersama, hal ini berkaitan dengan pertanyaan mbak yang tadi mengenai seleksi awal menjadi anggota KSM Brantas 76 ini, seperti saat ini KSM saya sedang macet, padahal bukan usaha saya tapi ibu Halimah salah satu anggota KSM Brantas 76 maka yang bertanggungjawab semua anggota KSM Brantas 76, mbak....” (Wawancara 19 Juli 2008)

4. Melalui pembentukan kelompok-kelompok ini sekaligus bisa dilakukan pembinaan terhadap anggotanya, baik yang dilakukan oleh pengurus KSM maupun oleh BKM. Karena diadakan pertemuan rutin dimana akan dibahas berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing anggota, baik menyangkut manajemen usaha, akses pasar, administrasi keuangan, serta berbagai masalah lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syarif, SH selaku Koordinator BKM Sejahtera adalah sebagai berikut:

“...pertemuan rutin warga yang diadakan setiap satu bulan sekali akan tetapi tidak selalu dihadiri oleh seluruh perwakilan tiap KSM, KSM-KSM yang perwakilannya tidak hadir dalam pertemuan rutin warga harus tetap melaporkan kondisi dan keadaan dari KSM, dan menerima keputusan apapun yang diputuskan dalam musyawarah warga tersebut...” (Wawancara 25 Juni 2008)

Pernyataan lain yang diungkapkan oleh Ibu Supiyah selaku salah satu anggota KSM Kebalen 68, beliau mengungkapkan:

“...anggota KSM kami kadang juga tidak datang ke pertemuan rutin mbak, soalnya kami sibuk dengan usaha kami tapi kami tetap melaporkan setiap bulannya perkembangan usaha kami...” (Wawancara 19 Juli 2008)

5. Pendampingan melalui Faskel. Anggota kelompok selain mendapat pembinaan melalui pengurus KSM juga mendapat bimbingan dari

Fasilitator Kelurahan (Faskel), yang merupakan mitra Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok dan anggotanya. Malahan Faskel ini juga bertanggung jawab dalam membantu pembentukan kelompok serta pengajuan proposal kegiatan yang akan dibiayai oleh BKM.(sumber: BKM Sejahtera)

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syarif selaku Koordinator BKM Sejahtera:

“...dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator,pemerintah selain memberi dana bantuan P2KP pemerintah juga menugaskan Faskel (Fasilitator Kelurahan) dalam membantu tugas-tugasnya hampir disegala bidang, misalnya membuat Anggran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)...”(Wawancara 25 Juni 2008)

Secara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan P2KP adalah memfasilitasi dan menumbuhkan iklim yang mendukung bagi upaya terwujudnya kemandirian masyarakat. Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu berperan sebagai fasilitator, monitoring, koordinasi dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam proses penyaluran dana hanya sebatas pada pendampingan atau fasilitator yang dilakukan dalam tataran Kota, kecamatan, dan kelurahan. Selebihnya masyarakat penerima bantuan yang dituntut untuk berperan aktif demi keberlangsungan proyek P2KP ini. Hal ini terlihat dari terbentuknya BKM sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya proses penyaluran dana BLM kepada target penerima sasaran dengan menggunakan pendekatan kelompok melalui pembentukan KSM yang merupakan target penerima dana bantuan P2KP ini.

b. Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP

Perlu diingat bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri. Dalam hal ini, kadang daerah kurang mampu di segi pembiayaan, tenaga dan ketersediaan fasilitas. Dengan adanya P2KP, pemda

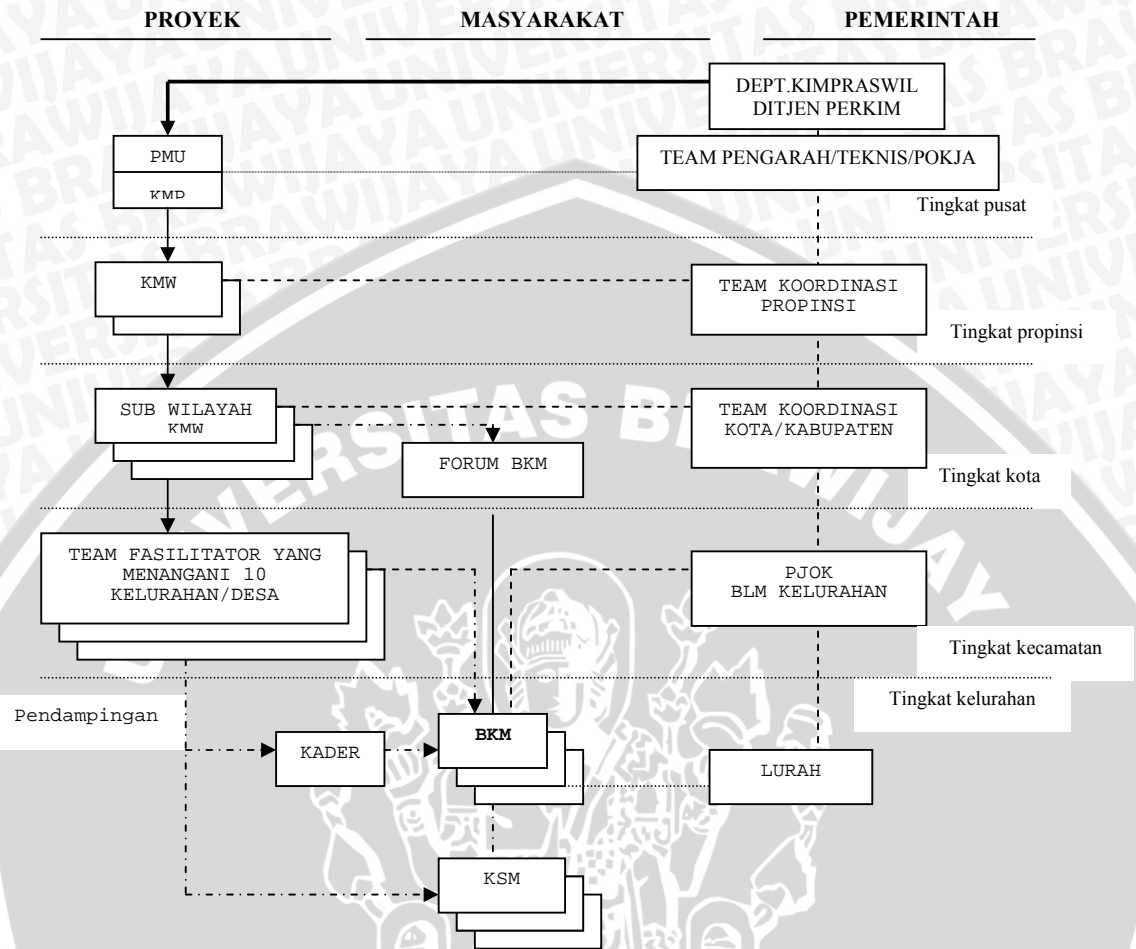
telah menunjukkan respon yang sangat baik. Namun, dalam pelaksanaannya kadang masih ada aparat yang kurang respon, ini disebabkan masih sangat kecilnya porsi birokrasi dalam program.

Peran Pemerintah dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran dalam keberlangsungan program P2KP ini. Ditingkat Kota/Kab, peran Pemda dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) telah dimulai sejak tahap persiapan, termasuk pada proses penentuan lokasi sasaran, pelaksanaan P2KP dan lokakarya P2KP. Kegiatan diawali dengan pelatihan dasar bagi aparat Pemerintah Daerah. Disadari bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan teramat diperlukannya dukungan dan peran serta Pemerintah kota/kabupaten, ataupun kelompok peduli setempat, guna penerapan kemitraan yang sinergis ditengah masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai prinsip *good governance*.

Untuk itu, pelaksanaan koordinasi mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat pusat harus dilaksanakan secara menyeluruh. Secara rinci hubungan kerja antar pelaksana program dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi P2KP sebagai berikut:



Struktur Organisasi P2KP



Catatan:

- (solid line) : Garis Fungsional
- (dashed line) : Garis Fasilitasi
- (dotted line) : Garis Koordinasi Khusus di Lokasi
- (dotted line) : Pilot Proyek Paket

Tim Koordinasi Nasional : Terdiri dari perwakilan Bappenas, Departemen Keuangan, Depdagri, dan Departemen Kimpraswil sebagai "Executing Agency"

PJOK : Penanggungjawab Operasional Kegiatan BLM di tkt. Kecamatan

PMU 1 : Project Management Pusat

KMP : Konsultan Manajemen Pusat

KMW : Konsultan Manajemen Wilayah

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

UPK : Unit Pengelola UPK

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

Kader : Kader Masyarakat

Sumber : Buku Pedoman Umum P2KP Tahap II

Sesuai dengan struktur organisasi P2KP tersebut terlihat bahwa hubungan Koordinasi Pemerintah di Tingkat Kota/kab dibentuk Tim Koordinasi Kota, Di tingkat kecamatan terdapat camat dan aparat kecamatan berkoordinasi dengan PJOK dan tim fasilitator serta di tingkat kelurahan Lurah dan aparat kelurahan berkoordinasi dengan fasilitator Kelurahan, kader masyarakat dan BKM dalam pelaksanaan proyek P2KP ini serta merespon berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP. Dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah Kota Malang secara optimal sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan P2KP

1) Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Di Tingkat Kota Pemerintah Daerah Kota Malang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) antara lain: 1) Tim Korkot, 2) PJOK, 3) Faskel, 4) BKM, 5) KSM dan Masyarakat.

Dari hasil dianalisis dengan struktur organisasi pelaksana P2KP di tingkat Kota yang bersumber dari Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 11
Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP
Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP	Posisi
Tim Korkot	Di Tingkat Kota
PJOK	Di Tingkat Kecamatan
Faskel	Di Tingkat Kelurahan
BKM	Di Tingkat Kelurahan
KSM dan Masyarakat	Di Tingkat Kelurahan

Sumber: Analisis Peneliti

(a) Di tingkat Kota

Pemerintah Daerah Kota Malang berperan dan bertanggungjawab menjamin kelancaran pelaksanaan P2KP di Kota Malang. Demi kelancaran tugasnya dapat membentuk Tim Koordinasi Kota yang terdiri dari Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota sebagai pengarah, Bappeko sebagai ketua, Dinas yang menangani perumahan atau permukiman sebagai wakil ketua, dan beranggotakan dinas-dinas terkait lainnya serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas Kimpraswil, dinas Kesehatan, dinas kebersihan, dll. Tugas utama pemerintah Daerah Kota Malang terkait dengan perannya sebagai Koordinator dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang antara lain: (1) Memberikan Legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya. (2) Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut ke sekretariat P2KP pusat, dengan tembusan ke Bappeda Tingkat I, (3) Melakukan pemasyarakatan program kepada aparat di kecamatan. (4) Membantu pelaksanaan P2KP pada pada wilayah kecamatan, bila diperlukan. (5) Membantu merealisasikan Forum Konsultan penanggulangan Kemiskinan Kota. (6) Melakukan Monitoring kegiatan pelaksanaan Program dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan. (7) mendukung koordinasi dan bekerjasama antar para pelaksana P2KP, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat, (8) melakukan Koordinasi dan bekerjasama dengan forum BKM Kota/Kab (9) berkoordinasi dengan Koordinator Kota KMW, dalam Menyelesaikan persoalan dan Konflik yang muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di Tingkat BKM/Kelurahan.

(b) Di Tingkat Kecamatan

Unsur Pemerintah di Tingkat Kecamatan terdiri dari camat dan aparat kecamatan yang berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Peran pokok aparat kecamatan adalah memonitoring kelancaran pelaksanaan P2KP diwilayah kerjanya. Tugas utama aparat

kecamatan terkait perannya sebagai koordinator antara lain berkoordinasi dengan PJOK dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, serta mencari jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan proyek P2KP ini. Dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan atau fasilitator Kelurahan. (Peran Pokok pemerintah di tingkat kecamatan dapat dilihat pada lampiran)

(c) Di Tingkat Kelurahan

Unsur-Unsur pemerintah di Tingkat Kelurahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan P2KP adalah aparat kelurahan yang berkoordinasi dengan masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan P2KP yaitu: faskel, BKM, dan Masyarakat/KSM. Faskel merupakan tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP yang diberikan kepada KSM dan BKM dalam menyiapkan usulan-usulan dari BKM dan KSM.

Dengan koordinasi yang baik, maka akan tercipta sinergi antara pelaku-pelaku yang berperan dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Hal ini senada dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Koordinator BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama, yaitu Bapak Syarif S.H adalah sebagai berikut ini :

“...Peran pemerintah itu pada dasarnya sebagai fasilitator dalam proses penyaluran dana selain itu pemerintah melakukan koordinasi serta membangun sinergi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program....”(Wawancara 04 April 2008)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang yang tergabung dalam Tim Korkot melakukan Koordinasi langsung dengan BKM, dan Masyarakat serta untuk mendukung proses pelaksanaannya Pemda Kota Malang juga melakukan Koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Kimpraswil, dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, dll.

Akan tetapi berdasarkan wawancara lebih lanjut ternyata ada pihak yang tidak dilibatkan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dwiyono

Santoso selaku Koordinator II BKM Sejahtera di Kelurahan Kotalama, beliau mengungkapkan:

"....dari awal pembentukan BKM kita sepakat kalau BKM ingin menjadi lembaga yang mandiri tanpa melibatkan campur tangan pemerintah kelurahan, karena badan ini dibentuk untuk pemberdayaan masyarakat yang tujuannya masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola semuanya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Sehingga para ketua RT dan ketua RW disini juga acuh dengan Program P2KP, karena pihak pemerintah tidak dilibatkan dalam mengotrol BKM, akan tetapi kami (BKM) berurusan langsung dengan Pemkot,Mbak..."(Wawancara 05 April 2008)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Isprapti selaku salah satu pegawai Di Kelurahan Kotalama, beliau mengungkapkan:

"....Kami pihak kelurahan tidak pernah ikut campur dalam urusan P2KP, pihak BKM yang menanganinya, sebenarnya tugas kami ini sebagai monitoring, tapi dari awal kita tidak dilibatkan jadi ya kita tidak tau bagaimana perkembangan proyek ini, apa lagi kalau masalah dana ya kita tidak tau apa-apa, sehingga para ketua RT dan ketua RW disini juga acuh dengan Program ini karena ketika ada rapat mereka tidak diikuti sertakan..."(Wawancara 19 Juni 2008)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai koordinator dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan koordinasi dengan pihak BKM Sejahtera serta tidak melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan sehingga dalam hal ini pihak kelurahan tidak mengetahui secara jelas bagaimana proyek ini berjalan. Tidak dilibatkannya pihak kelurahan dalam pelaksanaan P2KP membuat perangkat kelurahan yaitu para ketua RT dan Ketua RW enggan membantu ketika BKM dihadapkan oleh dana pinjaman yang tidak segera dikembalikan oleh masyarakat.

2) Bentuk Koordinasi

Dari awal pelaksanaan P2KP Di Kota Malang tahun 2000 Pemerintah Daerah Kota Malang berperan dan bertanggungjawab menjamin kelancaran pelaksanaan P2KP di Kota Malang. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan dan Konflik yang

muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di Tingkat BKM/Kelurahan.

Seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Ibu Endah, beliau menyatakan bahwa:

“.....dalam menjalankan peran kami (pemda) sebagai Koordinator, setiap bulan kami mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan P2KP serta menyelesaikan konflik yang muncul dan menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di Tingkat Kecamatan serta kelurahan/ BKM....” (Wawancara 25 Juli 2008)

Pernyataan lain dari Bapak Agung selaku salah satu staff di Bappeko yang mendukung Pernyataan bu Endah, beliau menyatakan bahwa

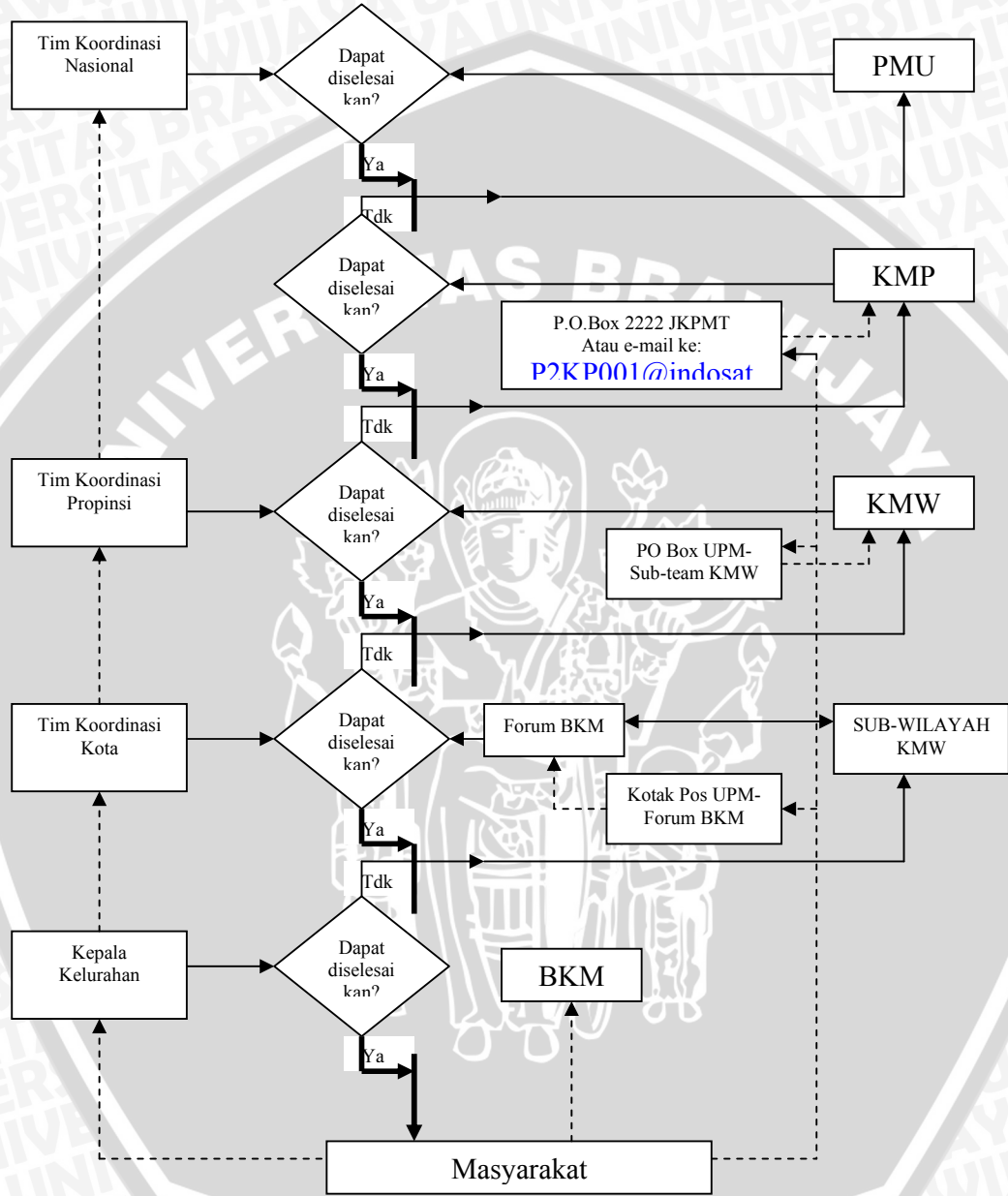
“...Kadang-kadang bisa sampai lebih dari 2 kali mbak rapatnya dalam sebulan kalau tiba-tiba ada permasalahan yang harus segera ditangani, kami (Pemerintah daerah) siap membantu menangani masalah tersebut...” (Wawancara 25 Juli 2008)

Pernyataan lain yang mendukung pernyataan bapak agung adalah pernyataan dari Bapak Syarief Hadi Suryono, SH. Beliau mengungkapkan bahwa:

“....kami (BKM) mbak, memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Proyek ini ke pemkot, dengan demikian pihak pemkot tau perkembangan jalannya proyek ini di lapangan selain itu kami juga melaporkan jika ada permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri di BKM....” (Wawancara 19 Juni 2008)

Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Malang dengan Pihak Kelurahan hingga BKM, kader masyarakat, dan fasilitator dalam memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik serta penanganan pengaduan diawali pada saat rapat BKM. Jika di tingkat kelurahan suatu masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka penanganan pengaduan akan diserahkan ke tingkat atasnya sampai suatu masalah itu benar-benar dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan sejak awal pelaksanaan P2KP di Kota Malang. Untuk penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut dapat dilihat pada bagan 6 berikut ini.

Bagan Mekanisme Penanganan Pengaduan



Sumber : Buku Pedoman Umum P2KP

Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait seperti kelurahan, fasilitator kelurahan, kader masyarakat dalam memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik serta pengaduan dilaksanakan pada rapat BKM. Jika di tingkat kelurahan suatu masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka penanganan pengaduan akan diserahkan ke tingkat atasnya sampai suatu masalah itu benar-benar dapat diselesaikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di kelurahan Kotalama, pihak kelurahan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek P2KP ini sehingga belum terbangun sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, koordinasi antara pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat sangat penting mengingat dengan adanya koordinasi yang baik antara pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, maka akan terbangun sinergi antara pelaku-pelaku yang berperan dalam pelaksanaan P2KP.

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan P2KP ini adalah Sumber daya manusia di dalam BKM Sejahtera yang Profesional dalam melaksanakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Hal ini dapat dilihat dari hasil audit yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal oleh lembaga independen terhadap BKM Sejahtera. Para anggota BKM mau bekerja sukarela untuk kemajuan BKM. Seperti yang di ungkapkan oleh Koordinator II BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama yaitu Bapak Dwiyono Santoso, Beliau mengungkapkan bahwa:

“...yang membuat kami para pengurus BKM mau bekerja sukarela adalah rasa sosial kami untuk dapat membantu warga Kelurahan Kotalama ini dari belenggu kemiskinan, biarpun kami tidak dibayar tapi kami ikhlas melakukan ini semua...” (Wawancara 05 April 2008)

Faktor pendukung yang lain adalah Faktor Kedisiplinan dari masyarakat Kelurahan Kotalama yang tercatat sebagai anggota KSM dan dapat mengangsur dana pinjaman mereka tepat waktu sehingga dana yang terkumpul dari angsuran KSM bisa digulirkan kembali pada KSM baru.

Hal ini terungkap melalui wawancara dengan Koordinator BKM yaitu Bapak Syarif Hadi Suryono, SH. Beliau mengungkapkan bahwa:

“....faktor pendukung dari pelaksanaan P2KP adalah Sumber Daya Manusia di dalam BKM yang professional, mereka selaku anggota mau bekerja sukarela demi kemajuan BKM serta masyarakat yang tercatat sebagai anggota KSM dan mengangsur tepat waktu sehingga dana dari angsuran KSM bisa digulirkan pada KSM baru”(Wawancara 07 April 2008)

Pernyataan lain yang diungkapkan oleh Saudari Maimunah selaku bendahara UPK di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama, beliau mengungkapkan bahwa:

”...di BKM ini mbak, kita selalu mengawasi program perguliran dana P2KP ini dengan membuat rekap tunggakan KSM setiap bulan dan melaporkannya kepada masyarakat, selain itu kita juga merencanakan langkah – langkah agar dapat menekan tunggakan KSM, serta melakukan pendataan terhadap KSM yang lancar yang diikutsertakan pada pemilihan KSM terbaik hal ini kami lakukan dengan harapan para anggota KSM dapat termotivasi untuk mengangsur tepat waktu...” (Wawancara 08 Juli 2008)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa selain Sumber Daya Manusia dari dalam BKM Sejahtera sendiri yang menjadi faktor pendukung dalam keberlangsungan program ini berasal dari masyarakat Kelurahan Kotalama yang tergabung dalam KSM dan dapat mengangsur tepat waktu yang diharapkan dengan adanya perguliran dana tersebut dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat untuk usaha yang mereka buat. Selain itu pihak BKM juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengawasi program perguliran dana tersebut diantaranya: Membuat rekap tunggakan KSM setiap bulan dan melaporkannya kepada masyarakat, Merencanakan langkah – langkah agar dapat menekan tunggakan KSM, Melakukan pendataan terhadap KSM yang lancar yang diikutsertakan pada pemilihan KSM terbaik.

b. Faktor Penghambat

Mekanisme Pelaksanaan Proyek yang dijalankan oleh BKM Sejahtera telah cukup baik dan hampir tidak memenuhi persoalan atau masalah yang signifikan. Permasalahan yang terjadi pada BKM Sejahtera menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan program P2KP ini, permasalahan yang dihadapi BKM Sejahtera saat ini meliputi beberapa faktor yaitu:

- 1) Modal : BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama mempunyai masalah dalam permodalan hal ini disebabkan oleh KSM yang mengalami kemacetan dalam mengangsur dana pinjaman mereka, sehingga menyebabkan terhambatnya perguliran kembali atau perputaran dana tersebut oleh karena kurang pemahaman dan persamaan pandangan dalam hal dana (Dapat dilihat dari daftar tunggakan KSM pada tabel 12). Hal ini terungkap melalui wawancara dengan Ketua BKM yaitu Bpk Syarif Hadi Suryono, SH. Beliau mengungkapkan :

“..... Masalah faktor penghambat yang dialami oleh BKM Sejahtera ini adalah masalah tunggakan cicilan oleh KSM. Hal ini disebabkan oleh pandangan mereka dana P2KP yang dikelola oleh BKM Sejahtera ini merupakan dana hibah dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma seperti dana BLT yang sering mereka terima....” (Wawancara 07 April 2008)

Hal ini senada dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Mislan merupakan anggota KSM Panjunan 47 yang mengalami penunggakan pembayaran, dimana beliau menganggap dana ini adalah dana Hibah. Beliau mengungkapkan bahwa:

“.... awalnya Saya tidak begitu faham apa itu P2KP. Ya, saya kira itu program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin secara Cuma-Cuma akan tetapi setelah KSM saya ditegur oleh pihak BKM dan ditagih dana yang pernah saya terima dahulu, saya baru memahami bahwa dana itu dana pinjaman yang sangat ringan dalam hal pengembalian dan jasa dari pinjamannya.....” (Wawancara 07 April 2007)

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Agus subakti yang merupakan anggota KSM Soling 48, beliau mengungkapkan bahwa:

”..awalnya saya mengajukan pinjaman akan membuka usaha pracangan untuk memperoleh dana P2KP dari BKM Sejahtera, namun setelah saya buka usaha pracangan saya ternyata sepi dan akhirnya saya bangkrut mbak dan kredit pinjamannya sudah habis,sekarang saya mbecak, penghasilan tiap hari hanya cukup buat makan jadi ya wajar saja klo’ saya nunggak bayarnya sekarang saya masih bingung bagaimana membayarnya...”(Wawancara 18 Juli 2008)

hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Istiqomah, beliau mengungkapkan bahwa:

”...pada saat saya pinjam uang di BKM niatnya mau di pakai tambah modal usaha saya dagang,mbak... tapi gara-gara bensin mahal jadi biaya ongkosnya sama modalnya gak sebanding, yang ada gak tambah untung malah rugi... kan jualan saya cuman di depan rumah saja mbak, ya sudah saya sampai sekarang belum bisa bayar tunggakannya....”(Wawancara 18 Juli 2008)

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan proyek ini adalah Faktor modal. BKM Sejahtera dalam hal ini mempunyai kendala dalam permodalan dikarenakan ketidaklancaran pembayaran angsuran daripada para peminjam dana bergulir hal ini dapat dilihat dari daftar tunggakan KSM pada Tabel 12. Kemacetan angsuran ini umumnya disebabkan oleh kemandegan atau kegagalan usaha, faktor pemasaran yang kurang baik atau alasan-alasan teknis lainnya.

Tabel 12
Daftar Tunggalan KSM
BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

No	Nama KSM	Anggota	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Angsuran Pokok	Nilai Tunggalan
1	Brantas 75	H. Imam Syahrani H. Abdul Rohman Achmad Mawardi Dul Mukrah	Jl. Muharto Gg. Vb Jl. Muharto Gg. Vb Jl. Muharto Gg. Vb Jl. Muharto Gg. Vb	Dg. Pakaian Dg. Pakaian Pracangan Pracangan	4.000.000	250.000	500.000
2	Panjunan 47	Mislan Abdul Hamid Istiqomah Sudarmi	Jl. L. Martadinata IIIb/1 4 Jl. Laks. Martadinata I/21 Jl. Kotalama I Jl. Laks. Martadinata I/20 Jl. Laks. Martadinata I/2	Las keliling Penjahit Dagang buah Pracangan Pracangan	5.000.000	416.667	2.916.667
3	Sidosadar 23	Achmadin Suwandri Moch. Yasin M. Jumlah Sa'i Achmad Rokip	Jl. Kebalen Wetan I/33 Jl. Sidosadar Jl. Kebalen Wetan I/26 Jl. Kebalen Wetan I Jl. Kebalen Wetan Sidosadar I Jl. Kebalen Wetan I/22	Reparasi Sepeda Dg. Sepatu Produksi Sepatu JB. Horden Pracangan Pracangan	6.000.000	500.000	1.500.000
4	Kebalen 66	M. Maskur Moch. Ali azis	Jl. Zaenal Zakse Ic/1117 Jl. Zaenal Zakse Ic/1117	Dg. Kopia Dg. Kaos	2.000.000	166.667	666.667
5	Soling 48	Abd. Malik M. Rois Sukamto Supini Muchammad Samini Sumiati A. Halil	Jl. Muharto Gg. IIIa/42 Jl. Muharto Gg. IIIa/31 Jl. Muharto Gg. IIIa Jl. Muharto IIIa Jl. Muharto Gg. IIIa Jl. Muharto Gg. IIIa/40 Jl. Muharto Gg. IIIa/34 Jl. Muharto Gg. IIIa/18	Konveksi Warung nasi Warung nasi Warung nasi Jual Buah Jual Bakso & Soto Jual Bakso Pracangan	11.250.000	1.125.000	2.250.000

		Agus Subakti	Jl.Muharto Gg.IIIb/22	Pracangan			
6	Kebalen 68	Choirul Farida Supiyah Nurul Alifah Sofi Hasanah	Jl. Zaenal Zakse I/40 Jl. Zaenal Zakse I/40 Jl. Zaenal Zakse Ic/1101 Jl. Zaenal Zakse I/33	Pracangan Pracangan Penjahit Pracangan	4.000.000	222.222	1.555.556
7	Kebalen 69	Abd. Wachid Susiatu Mu'inah	Jl. Zaenal Zakse III/1277 Jl. Zaenal Zakse III/1216 Jl. Zaenal Zakse III	J. Pakaian Bekas Pracangan J. Brg. Bekas	4.000.000	400.000	1.600.000
8	Panjunan 49	Abdullah Fatonah Sido	Jl. Laks Martadinata 44 Jl. Laks martadinata 3/280 Jl. Laks Martadinata 3B/73	Dg. Kelapa Dg. Kelapa Dg. Sepatu	1.500.000	150.000	450.000
9	Brantas 76	Siti Solicha Suimah/Halimah Djuari Sriatin	Jl. Muharto Vb Jl. Muharto Vb Jl. Muharto Vb Jl. Muharto Vb	Konveksi Konveksi Konveksi Konveksi	5.000.000	333.333	3.000.000
10	Cemara 42	Nur Romelah Bambang Abdul Ponidi Broto Sujarwo Sugiono Simun	Jl.Muharto Vb/691 Jl.Muharto Vb/692 Jl.Muharto Vb Jl. Muharto VII/680 Jl. Muharto 5B/746 Jl. Muharto 5B/687	Jasa Becak Jasa Becak Jasa Becak Jasa Becak Jasa becak	6.500.000	541.667	3.791.667
11	Sumber 63	P.Mursidik Sulistiono Sumaini	Jl.Muharto VII/32 Jl.Muharto VII Jl.Muharto VII	Rombeng Pracangan Jual.Ns Grg+Pangsit	3.000.000	250.000	2.000.000
12	Bango 77	Nur Hayatin Muinah Luluk Emy Y Endang Y Dasinah Waras	Jl.Muharto Gg VII/46 Jl.Muharto Gg VII/05 Jl.Muharto Gg. VII No.5 Jl.muharto Gg.VII/1 Jl.Muharto Gg.VII Jl. Muharto VII/02	Js.Konveksi Jual.Pakaian Jl.Perlatan.RT Js.Konveksi Jual.Pakaian Jual Jenang	6.000.000	500.000	2.000.000
13	Kotalama 49	Nurul Qomaria Isriyah Lilik Suhartini	Jl.Laks.martadinata VI/1169/9 Jl.Laks.martadinata 6/46 Jl.Laks.martadinata VI/41	Jual.Ayam jl. Rokok Jl. Kue	13.750.000	763.889	1.527.778

		Laila Sari Suratina Ningsih Endang Djasah Siti Asiyah Moch.Jantu Supaat Muhamad.Arifin Maimunah	Jl.Laks.martadinata 6/10 Jl. KebalenWetan VIB/22 Jl.Laks.martadinata 6/6 Jl.Laks.martadinata 6/1020 Jl.Laks.martadinata V/977 Jl.Laks.martadinata VI/975/4 Jl.Laks.martadinata 6/970 Jl.Laks.martadinata 6	Jual.Kue D. Bumbu Nasi goreng Nasi soto D. Bumbu Bengkel Ternak kenari Nasi soto			
14	GKA 23	M.Buchori Budiono	Graha Kota Asri Blok J-1 no.07 Jl.Muharto V Blok J-15	Perancangan Jual beli pasir	2.000.000	300.000	1.800.000
15	Panjunan 50	Tutie Lutfiyah Mujiati Rizka Silvia Riefki Zulkifli	Jl.Laks.martadinata II B/923 Jl.Laks.martadinata II B/926 Jl.Laks.martadinata II B Jl.Laks. martadinata II B	Salon Ternak Ayam Guru Pg. swasta	5.000.000	277.778	277.778
16	Kebalen 73	Supardi Jahuri Sikrum Sampirno	Jl. Zaenal Zakse III/25 Jl. Zaenal Zakse III/38 Jl. Zaenal Zakse III/ Jl. Zaenal Zakse III/2	Krj. Kulit Dg. Buah Pracangan Warng Kopi	7.500.000	750.000	4.050.000
17	Sumber 65	Suyadi Wiji Supeno Tukiyat Sopo nyono Mochammad Tosik	Jl. Muharto VII Jl. Muharto VII Jl. Muharto VII Jl. Muharto VII Jl. Muharto VII	Jasa Becak Jasa Becak Jasa Becak Jasa Becak Jasa Becak	7.500.000	625.000	625.000

Sumber: BKM Sejahtera

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa jumlah tunggakan KSM di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang masih tergolong besar hal ini terlihat dari besarnya jumlah tunggakan per KSM ada yang mencapai Rp 4.050.000,- dari total pinjaman Rp 7.500.000,-

- 2) Keaktifan dari para pengurus BKM sendiri. Para pengurus BKM Sejahtera ini selain menjadi anggota BKM mereka juga mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri sehingga pekerjaan dalam BKM menjadi tertunda-tunda dan mereka sangat sulit ditemui di kantor BKM. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM Sejahtera yaitu Bapak Syarif SH, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan P2KP di BKM ini adalah:

“...Kesibukan-kesibukan pribadi dari pengurus dan anggota BKM Sejahtera ini, mereka mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri selain menjadi pengurus BKM, sehingga mereka sulit ditemui di kantor BKM ini....” (Wawancara 05 April 2008)

Hal ini senada dengan pernyataan yang dinyatakan oleh saudari Hermin Dwi L selaku bandahara UPK, beliau mengungkapkan bahwa:

“.....selain sebagai pengurus BKM ini mereka mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting mbak, jadi para pengurusnya lebih mementingkan pekerjaannya sendiri-sendiri...” (Wawancara 18 Juli 2008)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketui bahwa selain faktor modal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di kelurahan kotalama kecamatan kedungkandang kota malang adalah kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya hal ini disebabkan selain sebagai pengurus di BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama para anggota BKM juga mempunyai pekerjaan sendiri.

- 3) Kualitas SDM masyarakat Kotalama: Permasalahan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kualitas SDM masyarakat sehingga

mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan dan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan kemanfaatan dana P2KP yang selama ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Suyadi selaku anggota KSM Sumber 65, beliau mengungkapkan bahwa:

“...lha wong saya SD aj gak lulus mbak, mau kerja apa lagi kalau gak mbecak? Pinjaman BKM ya saya buat makan sehari-hari mbak karena penghasilan saya yang tidak seberapa ditambah lagi istri saja tidak bekerja....”(Wawancara 26 Juli 2008)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu waras anggota KSM Bango 77, beliau mengungkapkan bahwa:

“.....hasil pinjaman saya buat biaya anak saya sekolah mbak, ya gimana lagi lha wong jualan jenang ini untungnya gak seberapa hanya cukup buat makan saja, ya saya kira itu uang Cuma-Cuma dari pemerintah.....”(Wawancara 26 Juli 2008)

Pemikiran Ibu Siti Aisyah sejalan dengan pemikiran Ibu Waras dalam memanfaatkan uang pinjaman mereka. Pemikiran beliau tertuang dalam pernyataan sebagai berikut:

“....ya gimana mbak, biaya sekolah sekarang mahal jadi uang pinjamannya saya pake' buat biaya anak saya sekolah, tunggakannya saya bayar disaat saya lagi ada sedikit keuntungan dari hasil jualan saya....”(Wawancara 28 Juli 2008)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Kotalama yang tergabung dalam KSM memiliki tingkat kesadaran yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan kemanfaatan dana P2KP yang selama ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh Kualitas SDM yang rendah terlihat dari data monografi dikelurahan Kotalama yang menunjukkan tingkat pendidikan yang relative rendah.

B. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Peran pemerintah daerah dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Poerwodarminta (2005, h.854) menyatakan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Sedangkan dalam pengertian sosiologi, peranan merupakan perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Dengan kata lain, peranan ialah pengejawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Hal ini dapat diartikan bahwa peranan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya, baik dalam berhubungan dengan pejabat, pemimpin bagian atau seluruh masyarakat. Serta menunjukkan adanya suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan status kedudukannya. Peranan ini lebih bersifat dinamis dan aktif. Untuk itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berpindah tidak saja ke pemerintah daerah tetapi ke masyarakat daerah. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan proses pemberdayaan masyarakat dapat mengalami percepatan melalui peran pemerintah daerah

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah memberikan peluang besar bagi daerah dalam pembangunan daerahnya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* (penyedia) dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan. Selain itu, Prasojo (2004, h.20) juga menegaskan bahwa peran pemerintah adalah sebagai mediator, koordinator, pendidik dan mobilisator serta peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung sehingga masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan, sedangkan pelaku-pelaku pembangunan dituntut untuk memiliki komitmen (kesepakatan) yang kuat untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri. Peranan pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Salah satu masalah dalam pembangunan yang harus segera ditangani adalah kemiskinan, khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Menurut Suryono (2001, h.112) kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang/kelompok orang diluar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari sebagai akibat tidak berdayanya pengaruh terhadap kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang berinteraksi satu sama lain.

Keadaan ekonomi di kelurahan Kotalama mencerminkan keadaan kemiskinan hal ini terlihat dari mata pencaharian sehari-hari penduduk Kotalama yang tidak menentu karena mayoritas penduduk kotalama hanya

bekerja sebagai pedagang, Tukang becak, bahkan ada juga yang bekerja sebagai pemulung oleh sebab itu yang menyebabkan kondisi ekonomi di kelurahan Kotalama sangat miskin (Hasil wawancara 25 Juni 2008). Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan yang diungkapkan oleh Kartasmita (1996, h.14-15), antara lain:

- a) Rendahnya taraf pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Untuk mencegah ini perlu adanya program wajib belajar sembilan tahun dan juga otonomi pendidikan
- b) Rendahnya derajat kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terjaminnya kesehatan seseorang akan membuat dirinya rajin bekerja sehingga pendapatan dapat meningkat dan kesejahteraan juga meningkat.
- c) Terbatasnya lapangan kerja
Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- d) Kondisi terisolir
Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berbudaya karena terpencil sehingga tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Menurut pengamatan peneliti faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Kotalama terdapat pada poin a, b, dan c. Dimana faktor penyebab kemiskinan Masyarakat Kotalama dapat dilihat dari rendahnya taraf pendidikan sesuai dengan Data Monografi Kelurahan Kotalama menunjukkan bahwa rendahnya jumlah penduduk Kelurahan Kotalama yang meneruskan pendidikannya sampai ke akademi ataupun sarjana. Faktor yang kedua adalah rendahnya derajat kesehatan, hal ini terbukti dari masih banyak kartu-kartu sehat (keluarga miskin) yang beredar di masyarakat, setiap hari tampak dipusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas dipenuhi warga untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik di puskesmas pusat maupun puskesmas pembantu. Dua buah puskesmas yang ada di kelurahan Kotalama merupakan tumpuan masyarakat sebagai deteksi dini terhadap masalah kesehatan terutama bagi keluarga miskin. Namun sarana dan prasarana yang ada perlu dilengkapi, sehingga memadai untuk akses pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin. Dan faktor yang ketiga adalah terbatasnya lapangan pekerjaan hal ini berhubungan dengan faktor yang pertama yaitu rendahnya taraf pendidikan yang menyebabkan semakin sempit lapangan pekerjaan yang memadai dan akhirnya masyarakat Kotalama hanya bekerja seadanya seperti pedagang, tukang becak bahkan ada juga yang bekerja sebagai pemulung. Hal ini yang menyebabkan keadaan ekonomi di Kelurahan Kotalama sangat miskin.

Sejauh ini Pemerintah Daerah Kota Malang telah melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat Kotalama melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimana proyek ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang. Paradigma Pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat. Kartasmita (1996) dalam Prasojo (2004, h.14), menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

a. Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam proses penyaluran dana bantuan P2KP

Selama ini pemerintah sebagai penguasa mendominasi pembangunan dengan pola sentralistik dan masyarakat dijadikan obyek pembangunan. Hal ini menyebabkan melebarnya kesenjangan antara masyarakat golongan kaya dan golongan miskin dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin tidak berdaya. Sehingga pemerataan kemakmuran dan keadilan sulit terwujud.

Keterlibatan pemerintah daerah Kota Malang yang hanya sebatas memantau dan memberikan legalitas semakin membuka peluang bagi masyarakat Kotalama untuk mengekspresikan diri dan menggali potensi dan

partisipasinya. Minimnya keterlibatan pemerintah daerah ini secara implisit menunjukkan adanya dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap proses pemberdayaan dimana pemerintah hanya bersifat sebagai katalis dan penyedia fasilitas yang diperlukan bagi proses pemberdayaan dalam komunitas masyarakat. Dengan cara ini masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab atas segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepadanya salah satunya melalui Proyek P2KP ini.

Program-program P2KP ini harus dilakukan secara terpadu bukan saja pada proses perencanaan, tetapi pada sasaran yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing wilayah tersebut. Pemikiran seperti ini sebenarnya ingin menyempurnakan pendekatan yang selama ini diterapkan dalam pembangunan yaitu pendekatan penyeragaman dimana suatu program pembangunan diterapkan di semua wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, pemberdayaan suatu masyarakat harus diupayakan agar dapat berorientasi pada masyarakat itu sendiri, sehingga peran pemerintah yang selama ini berada di depan akan bergeser sebagai fasilitator masyarakat. Adapun perubahan paradigma peranan pemerintah tersebut antara lain :

- a) Pelaksana menjadi fasilitator
- b) Memberikan instruksi menjadi melayani masyarakat
- c) Mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.
- d) Bekerja untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi (Kaloh, 2002, h. 132)

Senada dengan apa yang diungkapkan Kaloh bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P2KP ini hanya sebagai fasilitator saja dalam proses penyaluran dana tidak sebagai pelaksana proyek, hal ini sesuai dengan tujuan dari Proyek P2KP ini adalah mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui:

- a) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru;

- b) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang item a;
- c) Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok;
- d) Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan;
- e) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. (sumber: BKM Sejahtera)

Pada dasarnya kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat, dan para pihak terkait (*stakeholder*). Sasaran P2KP di masyarakat adalah KSM yang terdiri atas perorangan, maupun keluarga (miskin) yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan (Faskel). Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang dapat terlihat dari tingkat Kota, Tingkat kecamatan, dan tingkat Kelurahan.

Di tingkat Kota wujud nyatanya dengan pembentukan Tim Korkot. Dalam Pelaksanaan Proses penyaluran dana bantuan P2KP Tim Koordinasi Kota bekerjasama dengan Tim Komite Manajemen Wilayah (KMW) yaitu membantu KMW dalam penyusunan Kriteria kemiskinan untuk penetapan calon kelurahan sasaran dan mengusulkan kelurahan yang sebaiknya diprioritaskan. Sedangkan Di tingkat kecamatan diwujudkan dengan terbentuknya Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK). PJOK adalah penanggungjawab administrasi proyek yang diangkat dari aparat Pemerintah daerah Kota/Kab dan ditempatkan di kecamatan. Dan pada Tingkat Kelurahan

ada pada aparat kelurahan serta diwujudkan dengan terbentuknya Fasilitator Kelurahan (Faskel). Faskel merupakan tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP di lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dalam menyiapkan usulan-usulan, yang didahului dengan pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi.

Tim karkot, KMW, PJOK, Fasilitator Kelurahan, BKM, serta KSM memiliki peran penting sebagai pelaksana Proyek P2KP untuk mencapai keberhasilan proyek P2KP. Para pelaksana Proyek ini tidak sekedar memperlancar jalannya atau pelaksanaan proyek, tetapi juga membantu mengarahkan, membimbing atau menjadi konsultan dalam teknis ataupun non teknis pelaksanaan proyek. Baik KMW maupun fasilitator kelurahan bertanggungjawab dalam mendorong, mendidik dan memampukan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya. Di sisi lain keberadaan KMW ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan proyek. Hingga akhirnya pendampingan dan campur tangan ini mulai di lepas agar masyarakat dapat melaksanakan proyek secara mandiri.

Dalam rangkaian proses tersebut peran yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah (Kartasmita, 1996). Ketiga peran ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Peran pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama cukup strategis dengan memfasilitasi, memberi dukungan serta memotivasi masyarakat dalam rangka menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan P2KP .

Peran tersebut dapat efektif diterapkan dengan menggunakan strategi "ACTORS" (Cook & Maculay, 1997) yang terdiri dari (1) *authority* atau memberikan wewenang atau kepercayaan pada masyarakat untuk melakukan pembangunan demi peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat disini diberi wewenang untuk menuju kemandirian mereka dengan apa yang telah

diberikan oleh BKM melalui serangkaian pembekalan pelatihan, pengelolaan manajemen pengelolaan kemampuan dan pemberian pinjaman modal usaha dana bergulir melalui P2KP ini. (2) *Confidence and competence* atau memupuk rasa percaya diri dan kemampuan dari masyarakat, masyarakat harus dapat percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Tahap rasa percaya diri mereka tidak akan mencapai keberhasilan dalam memandirikan diri demi tercapai kesejahteraan yang mereka inginkan (3) *trust*, yaitu menyakinkan masyarakat akan potensi yang dimilikinya, masyarakat harus yakin akan potensi diri mereka yang belum diberdayakan, dengan keyakinan itu masyarakat yakin akan dapat mencapai ke titik keberhasilan yang mereka inginkan. (4) *opportunity* atau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mngembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah menuju keberhasilan yang mereka inginkan. (5) *responsibility*, yakni menekankan pentingnya tanggung jawab atas perubahan yang dilakukan masyarakat, masyarakat harus bertanggung jawab itu masyarakat dapat bisa mencapai keberhasilan yang diinginkan dan (6) *support* atau memberikan dukungan pada masyarakat atas upaya pemberdayaan yang dilakukannya.

Menurut Kaloh (2002, h. 138) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai program konkrit dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a) Apakah pemerintah daerah memiliki rencana untuk penanggulangan kemiskinan untuk daerahnya.

Dengan adanya rencana induk ini bisa kita lihat keseriusan pemerintah dalam mawujudkan usaha pengentasan kemiskinan, selain itu rencana induk yang ada juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi perjalanan rencana tersebut.

- b) Apakah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan cukup proporsional dalam APBD sebagai program kerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Adanya alokasi dana untuk program ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan. Pendanaan ini sangat vital mengingat bagaimanapun bagus suatu rencana induk, tetapi jika tidak diimbangi dengan dana yang cukup, rencana tersebut tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, pendanaan ini juga digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

c) Apakah ada forum rapat rutin penanggulangan kemiskinan

Seperti kita tahu bahwa fungsi pemerintah pada masa otonomi daerah adalah menjadi fasilitator atau memadukan berbagai pihak yang terkait pada program ini, maka berbagai bentuk pertemuan atau rapat untuk mengkoordinasikan pihak-pihak perlu dilakukan. Sehingga dapat dikatakan apabila pemerintah tidak mengadakan berbagai pertemuan atau rapat rutin. Berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan programnya.

d) Apakah dilakukan evaluasi rutin tahunan

Diatas sudah disebutkan bahwa program merupakan perwujudan konkrit dari suatu rencana, maka suatu program tidak bisa dilepaskan dari kegiatan evaluasi untuk menilai kegiatan atau program tersebut, baik menilai perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai dengan pengontrolan/pengawasan. Dimana hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk membuat rencana baru yang lebih baik. Sehingga kegiatan ini juga tidak bisa ditinggalkan dalam melihat keseriusan pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Indikator diatas bukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, tetapi semata-mata untuk mengetahui keseriusan pemerintah dalam program ini. Dengan melihat beberapa indikator diatas, pemerintah daerah kota Malang telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Malang khususnya di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang ini.

b. Pemerintah Daerah Melakukan Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP

Selain sebagai fasilitator, Prasojo (2004, h.20) juga menegaskan bahwa peran pemerintah adalah sebagai mediator, koordinator, pendidik dan mobilisator. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang juga sebagai Koordinator yaitu dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP demi kelancaran pelaksanaan proyek ini. Karena dalam mencapai tujuan utama P2KP perlu didukung oleh beberapa pihak yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal itu sangat berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan sekalipun pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama tersebut adalah 1) Tim Korkot, 2) PJOK, 3) Faskel, 4) BKM, 5) KSM dan Masyarakat. Dari hasil dianalisis dengan struktur organisasi pelaksana P2KP di tingkat Kota yang bersumber dari Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 13
Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP
Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Pihak yang berperan dalam pelaksanaan P2KP	Posisi
Tim Korkot	Di Tingkat Kota
PJOK	Di Tingkat Kecamatan
Faskel	Di Tingkat Kelurahan
BKM	Di Tingkat Kelurahan
KSM dan Masyarakat	Di Tingkat Kelurahan

Sumber: Analisis Peneliti

Pihak-pihak tersebut sangatlah berperan dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang. Dalam pelaksanaannya bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam merespon berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi di Kelurahan Kotalama yaitu pemerintah daerah yang tergabung dalam tim Korkot bersedia membantu memecahkan permasalahan

yang sedang terjadi, hal ini terlihat dari telah diadakannya pertemuan rutin satu bulan sekali yang bertujuan untuk membicarakan bersama permasalahan-permasalahan serta perkembangan dari pelaksanaan P2KP di lapangan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang salah satu aktor tidak dilibatkan yaitu pihak kelurahan. Hal ini menyebabkan kurang koordinasi antara pihak pemerintah khususnya Kelurahan Kotalama dengan Pihak BKM (Masyarakat) yang seharusnya pihak kelurahan perlu diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP. Bagaimanapun juga pihak kelurahan merupakan salah satu aktor yang sangat berperan dalam pelaksanaan P2KP dimana mereka harus saling melakukan koordinasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari P2KP tersebut. Dengan koordinasi yang baik, maka akan tercipta sinergi antara pelaku-pelaku yang berperan dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Hal ini sesuai dengan Lembar pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang dijelaskan bahwa kelurahan juga memiliki tugas/peran yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP terutama di wilayahnya yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan legitimasi dan dukungan pada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing; 2) Melakukan pemasyarakatan Program; 3) Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama Faskel dan Konsultan serta meninjau pelaksanaan di lapangan; 4) Membantu menyusun criteria kemiskinan untuk calon penerima bantuan; 6) Membantu pembentukan BKM; 7) Membantu terselenggaranya pertemuan antara Faskel, pengurus BKM dan pengurus RT/RW; 8) Mendukung dan menghadiri pertemuan-pertemuan antara KSM, BKM, KMW dan Faskel dalam Tahap perencanaan, seleksi dan penetapan usulan program; 9) Mendukung usulan kegiatan KSM yang disetujui dan ditetapkan oleh BKM. Melihat permasalahan tersebut maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dilibatkannya kembali pihak kelurahan sesuai dengan

peranannya dan perlunya keaktifan dari pemerintah untuk selalu memantau pelaksanaan P2KP yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat.

2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian dan pemaparan data di subbab-subbab sebelumnya dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah Sumber Daya Manusia di dalam BKM Sejahtera yang dapat dikatakan Profesional dalam melaksanakan tugasnya, Hal ini dapat dilihat dari hasil audit yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal oleh lembaga independen terhadap BKM Sejahtera dimana penyusunan laporan-laporan dan pembuatan perencanaan akan program-program yang akan dilaksanakan oleh BKM sudah sangat baik dan mewakili kepentingan masyarakat, Serta rasa sosial yang tinggi yang dimiliki oleh anggota BKM Sejahtera sehingga mau bekerja sukarela demi keberlangsungan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat Kotalama dari belenggu kemiskinan.

Faktor pendukung yang lain adalah Faktor Kedisiplinan dari masyarakat dapat dilihat dari banyaknya atau antusiasme masyarakat bergabung dalam KSM-KSM untuk kegiatan ekonomi produktif sebagai pemanfaat dan peminjam dana bergulir serta dapat mengangsur dana pinjaman mereka tepat waktu sehingga dana yang terkumpul dari angsuran KSM bisa digulirkan kembali pada KSM baru.

Dengan bergabungnya masyarakat dalam KSM-KSM maka akan dapat mengembangkan dan menguatkan BKM karena hal ini akan menambah modal BKM untuk menjalankan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Kotalama.

b. Faktor Penghambat

Lebih lanjut Prasajo (2004, h.11), menjelaskan permasalahan lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. *Diskontinuitas dan diskoordinasi*, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh LSM.
2. *Disinformasi program*, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut terkadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. *Disorientasi*, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.
4. *Generalisasi*, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut, maka pendekatan pembangunan dan pemberdayaan yang tidak bersifat monolitik dan lebih bersifat dinamis.
5. *Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional*, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, tujuan

pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan di lapangan.

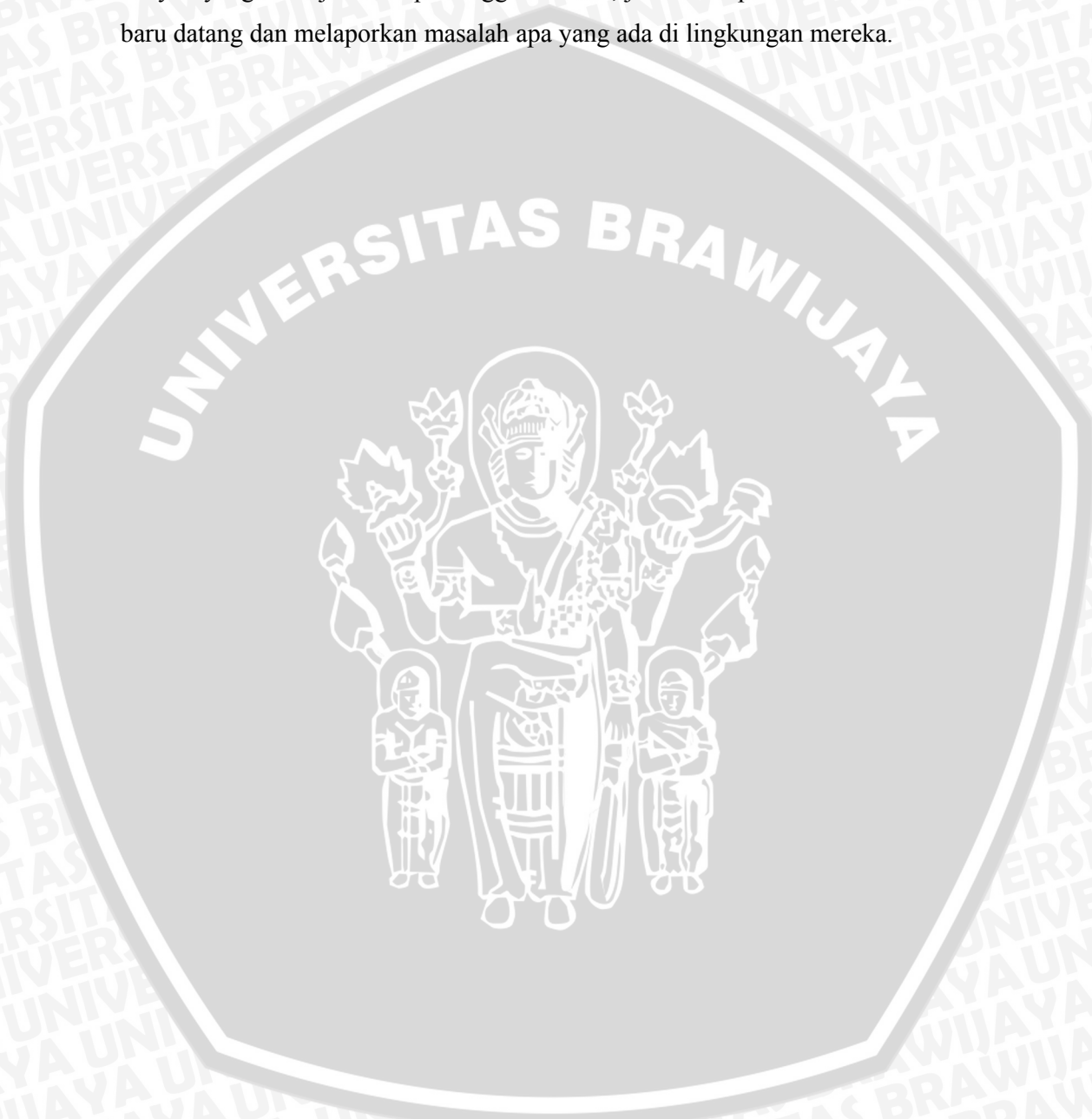
6. *Indikator yang tidak tepat*, yaitu pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Berbagai hambatan-hambatan yang telah diungkapkan oleh Prasojo merupakan hambatan yang umumnya melekat pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Baik faktor internal maupun faktor eksternal harus dicari upaya pemecahannya agar pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Permasalahan yang dialami oleh BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui Proyek P2KP tidak seluruhnya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prasojo. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan program ini. Faktor penghambat tersebut salah satunya adalah masalah klasik yang sering dialami oleh BKM Sejahtera yaitu penunggakan cicilan dari KSM, sehingga modal yang menguatkan BKM pun menjadi berkurang hal ini menyebabkan terhambatnya perguliran kembali atau perputaran dana tersebut oleh karena kurang pemahaman dan persamaan pandangan dalam hal dana hal ini disebabkan oleh penduduk Kelurahan Kotalama yang tergabung dalam KSM memiliki tingkat kesadaran yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan kemanfaatan dana P2KP yang selama ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh Kualitas SDM yang rendah terlihat dari data monografi dikelurahan Kotalama yang menunjukkan tingkat pendidikan yang relative rendah.

Permasalahan-permasalahan lain dalam BKM Sejahtera kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang adalah permasalahan internal dari dalam BKM yaitu Kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang

tidak bisa dihindari, sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Untuk aktif di kantor BKM setiap hari sangat sulit, oleh karena itu para pengurus BKM Kotalama lebih banyak yang bekerja di tempat tinggal mereka, jika ada rapat bulanan mereka baru datang dan melaporkan masalah apa yang ada di lingkungan mereka.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui dokumentasi, maupun wawancara serta sesuai dengan data yang telah disajikan dan dibahas sebelumnya oleh peneliti tentang Peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan P2KP di Kota Malang ditunjang sepenuhnya oleh peran dari Pemerintah Daerah Kota Malang Pada hakekatnya Pemerintah Daerah yang menjadi fasilitator adalah untuk memberikan pendampingan atau upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan P2KP agar mencapai keberhasilan salah satunya memfasilitasi proses penyaluran dana bantuan P2KP. Tim korkot, KMW, PJOK, Fasilitator Kelurahan, BKM, serta KSM memiliki peran penting sebagai pelaksana Proyek P2KP untuk mencapai keberhasilan proyek P2KP. Para pelaksana Proyek ini tidak sekedar memperlancar jalannya atau pelaksanaan proyek, tetapi juga membantu mengarahkan, membimbing atau menjadi konsultan dalam teknis ataupun non teknis pelaksanaan proyek. Baik KMW maupun fasilitator kelurahan bertanggungjawab dalam mendorong, mendidik dan memampukan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya. Di sisi lain keberadaan KMW ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan proyek. Hingga akhirnya pendampingan dan campur tangan ini mulai di lepas agar masyarakat dapat melaksanakan proyek secara mandiri.

2. Dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang salah satu aktor tidak dilibatkan yaitu pihak Kelurahan. Hal ini menyebabkan kurang koordinasi antara pihak pemerintah khususnya kelurahan Kotalama dengan Pihak BKM (Masyarakat) yang seharusnya pihak kelurahan perlu diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP. Bagaimanapun juga pihak kelurahan merupakan salah satu aktor yang sangat berperan dalam pelaksanaan P2KP dimana mereka harus melakukan koordinasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari P2KP tersebut.
3. Faktor Pendukung pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang antara lain:

Dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang menjadi Faktor pendukungnya adalah Sumber Daya Manusia di dalam BKM Sejahtera yang Profesional dalam melaksanakan P2KP. Dan Faktor pendukung yang lain adalah Faktor kedisiplinan dari masyarakat dapat dilihat dari banyaknya atau antusiasme masyarakat bergabung dalam KSM-KSM untuk kegiatan ekonomi produktif sebagai pemanfaat dan peminjam dana bergulir serta dapat mengangsur dana pinjaman mereka tepat waktu sehingga dana yang terkumpul dari angsuran KSM bisa digulirkan kembali pada KSM baru.

Dengan bergabungnya masyarakat dalam KSM-KSM maka akan dapat mengembangkan dan menguatkan BKM karena hal ini akan menambah modal BKM untuk menjalankan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Kotalama.

4. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang antara lain dapat dilihat dari dalam BKM Sejahtera yaitu proses pengembalian dana bantuan yang tidak tepat waktu atau jatuh temponya, sehingga mengakibatkan proses perguliran/perputaran dana terhambat. Sehingga modal yang

menguatkan BKM pun menjadi berkurang, hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang kurang maksimal dari BKM sendiri yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai dana bantuan serta kondisi ekonomi yang tidak mendukung dan ketidaksiapan masyarakat dalam perubahan yang terjadi di Negara ini. Permasalahan-permasalahan lain dalam BKM Sejahtera Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang dapat menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan proyek ini antara lain kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya. (*lampiran Job Diskripsi*).

B. Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) antara lain :

- 1) Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Perlu adanya koordinasi antara aktor yang berperan baik dari Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri hingga Pemerintah Kelurahan serta BKM dan anggota KSM/KMA yang tergabung dalam proyek ini. Agar dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaiknya pihak kelurahan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek P2KP di Kelurahan Kotalama sesuai peran, fungsi dan tugas pokoknya.
- 2) Permasalahan-permasalahan Internal dari dalam BKM Sejahtera yaitu kesibukan-kesibukan pribadi dari para pengurus BKM sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya yang kurang maksimal maka seharusnya para pengurus BKM berusaha menumbuhkan dan mempertahankan komitmen untuk lebih meluangkan waktu dan menuangkan pemikiran yang arif dan bijaksana demi turut serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

- 3) Sosialisasi oleh BKM harus lebih ditingkatkan lagi agar proses program penanggulangan kemiskinan ini dapat berjalan dengan yang diharapkan. Maka sebaiknya dilaksanakan kegiatan-kegiatan sarasehan atau diskusi yang lebih intens lagi untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KSM dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kotalama
- 4) Kemacetan dalam angsuran dana bantuan merupakan hal yang kurang baik dalam pelaksanaan proyek P2KP ini, BKM maupun masyarakat perlu mengembangkan system peraturan dan sanksi yang lebih efektif bagi terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana proyek ini, baik yang bersifat imdividual maupun kolektif. Dengan demikian masyarakat akan berperan aktif sebagai pengawas yang turut bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan proyek.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bawsir, Revisond, dkk. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. ELSAM. Jakarta
- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga
- Cook, Sarah dan Steve Macaulay, *Perfect Empowerment*. Elex Media Komputindo. 1997
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewanta, A.S. et al. 1999. *Kemiskinan Dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta. Aditya Media
- Effendi, Tadjanuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Hardjanto. Imam. H. 2006. *Reformasi Administrasi Publik. Handout series*. Malang
- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Australia: Longman Pty Ltd.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDIES
- Kaloh, J. 2002. *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Milles dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi refisi. Rosada Karya. Bandung
- . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Rosda Karya. Bandung
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina aksara
- Poerwodarminto, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Refika Aditama *Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung : STKS Press
- Sevilla, councelo G. 1993. *Pengantar metodologi Peneltian*. Jakarta. University Indonesia Press

Sutrisno, Loekman. 2000. *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung:

Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.

Suparlan, Parsudi, 1984, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta, Sinar Harapan

Suherman. K, Dr, SH, MSi. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. PT. Alfabeta.

Sulistiyani, ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemeberdayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada

Suryono, agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Universitas Negeri Malang

Soekarno.Azidin Yustan. 1990. *Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah da Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Massa*. Bandung. Bina Citra

Wojowasito, S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. Shinto Dharma

Jurnal

Prasojo,Eko.2003. *People And Society Empowerment:Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, vol IV, No.2, Maret-Agustus:10-24

Internet

-----2000."Tinjauan Pustaka", diakses pada 18 Juli 2008 dari www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf+pengertian+peran&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id

: <http://www.P2kp.org/pustaka.asp.?catid=1&> , diakses pada 20 februari 2008

INTERVIEW GUIDE

Kelurahan Kotalama

1. Jelaskan Keadaan Ekonomi Di Kelurahan Kotalama?
2. Ceritakan Kondisi Kemiskinan Di Kelurahan Kotalama?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama?
4. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP ini?
5. upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul?

BAPPEKO Malang

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai fasilitator Dalam Pelaksanaan P2KP di Kota Malang, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah?
2. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang?
3. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan siapa saja dalam pelaksanaan P2KP di Kota Malang ini?
4. Bentuk-Bentuk Koordinasinya seperti apa?
5. Kapan di mulai koordinasinya?

BKM

1. kapan P2KP mulai masuk di Kelurahan Kotalama?
2. Kapan BKM dibentuk?
3. bagaimana proses pembentukannya?
4. siapa saja yang duduk dalam kepengurusan BKM?
5. bagaimana proses pemilihannya?
6. kegiatan apa saja yang telah di lakukan oleh BKM?
7. berapa jumlah KSM di Kelurahan Kotalama?
8. berapa dana yang diperoleh saat itu?
9. digunakan untuk apa saja?
10. bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan P2KP sebagai fasilitator di kelurahan kotalama?

11. apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan P2KP ?
12. bagaimana bentuk koordinasi pemerintah daerah dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi?

Masyarakat

1. apa itu P2KP?
2. siapa yang menginformasikan P2KP?
3. dana pinjaman di buat apa?
4. Bagaimana proses menjadi anggota suatu KSM?
5. Apa itu tanggung renteng?





LAMPIRAN-LAMPIRAN

repository.ub.ac

Tupoksi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

▪ Di Tingkat Kota/Kab

Unsur Pelaksana yang terdapat pada Tingkat Kota adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemerintah daerah kota : Tim Koordinasi Kota (Kepala daerah, Bappeda, dan dinas-dinas terkait)

Peran Pokok mereka adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.

Tugas Utama tim itu adalah sebagai berikut:

- g. Memberikan Legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
- h. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut ke secretariat P2KP pusat, dengan tembusan ke Bappeda Tingkat I
- i. Melakukan pemasyarakatan program kepada aparat di kecamatan
- j. Membantu pelaksanaan P2KP pada pada wilayah kecamatan, bila diperlukan.
- k. Membantu merealisasikan Forum Konsultan penanggulangan Kemiskinan Kota
- l. Melakukan Monitoring kegiatan pelaksanaan Program dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan.

2. Unsur konsultan pada daerah kota, yaitu Tim bagian dari KMW. Mengingat cakupan wilayah kerja KMW cukup luas (Mencakup beberapa Daerah Kota/Kab), mereka dianjurkan untuk menempatkan satuan tugas atau beberapa subsatuan tugas pada masing-masing sub-SWK

▪ Di Tingkat Kecamatan

Unsur yang terdapat pada tingkat kecamatan dalam pelaksanaan P2KP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah tingkat kecamatan, yang terdiri atas
 - a. Camat dan aparatnya, dan
 - b. PJOK

Peran pokok aparat kecamatan adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, sedangkan tugas utamanya adalah sebagai berikut:

- g. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - h. Melakukan Pemasarakatan program kepada kelurahan-kelurahan di wilayah kerjanya.
 - i. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada wilayah kelurahan memerlukan koordinasi
 - j. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan dan atau fasilitator kelurahan
 - k. Membantu memberikan masukan kepada KMW dan fasilitator kelurahan mengenai penduduk dan kelurahan miskin, baik berdasarkan criteria yang disusun sendiri, maupun berdasarkan arahan dari Pemerintah daerah Kota/Kab atau instansi terkait lainnya.
 - l. Menyusun daftar lokasi kelurahan dalam kecamatan berdasarkan besarnya jumlah penduduk miskin dalam kelurahan dan menyampaikan kepada Pemerintah daerah Kota/Kab
 2. Unsur konsultan di daerah kecamatan, yaitu bagian dari KMW

▪ **Di Tingkat Kelurahan**

Pada tingkat kelurahan, setidaknya terdapat dua unsure sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah tingkat kelurahan (lurah dan aparatnya)
2. BKM

Unsur pemerintah tingkat kelurahan, yaitu lurah dan aparatnya. Peran pokok mereka adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, dengan tugas utama sebaga berikut:

11. memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
12. melakukan pemasyarakatan program kepada warga masyarakat di kelurahan, khususnya kepada kelompok-kelompok atau organisasi social dan kemasyarakatan yang ada.
13. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama konsultan dan fasilitator kelurahan, serta membantu pelaksanaan peninjauan lapangan
14. Membantu menyusun kriteria kemiskinan untuk penetapan calon penerima bantuan P2KP. Kriteria ini dapat dibuat berdasarkan ketentuan dari pemerintah daerah provinsi dan pemda kota/kab, berdasarkan pembahasan bersama KMW/fasilitator kelurahan, atau pembahasan bersama warga masyarakat di kelurahan.
15. Mengusulkan kepada KMW/Fasilitator kelurahan daftar keluarga-keluarga miskin dalam satu kelurahan untuk mendapat bantuan P2KP
16. Membantu terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/fasilitator kelurahan dalam rangka penyebarluasan informasi P2KP
17. Membantu pembentukan BKM serta kegiatan-kegiatannya.
18. Mendukung dan menghadiri pertemuan-pertemuan antara KSM, BKM, KMW, dan fasilitator kelurahan dalam tahap perencanaan, seleksi, dan Penetapan usulan program-program kegiatan
19. Mendukung usulan-usulan kegiatan KSM yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BKM berdasarkan pertimbangan KMW
20. Lurah, atau yang mewakili, bersama PJOK menandatangani usulan BKM dan SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) dalam kapasitas *mengetahui*.

Tugas Pokok dan fungsi dari PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan)

1. Mendukung proses pertemuan di forum kelurahan yang melibatkan BKM, KSM, aparat kecamatan/kelurahan, dan RT/RW
2. memantau proses penentuan lokasi kelurahan prioritas, sesuai dengan penentuan lokasi target P2KP yang dilakukan oleh aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat Pemda tingkat II
3. Memantau KMW dan fasilitator kelurahan dalam proses pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat paling bawah.
4. Membantu BKM dalam proses pembentukan rekaning di BRI untuk penyaluran dana keperluan P2KP
5. Mengelola dana administrasi proyek PJOK
6. bersama BKM dan KSM, atas rekomendasi KMW, menandatangani SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) untuk pencairan dana
7. Membuat laporan berkala kepada Bupati/Walikota dan camat.